

Vol. 3 | No. 1 | Tahun 2020

# **RADIKALISME DAN *HOMESCHOOLING*** MENAKAR KETAHANAN DAN KERENTANAN



**CONVEY Indonesia**  
**PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia**



# RADIKALISME DAN *HOMESCHOOLING*:

Menakar Ketahanan dan Kerentanan



## **CONVEY REPORT**

Radikalisme dan *Homeschooling*: Menakar Ketahanan dan Kerentanan  
Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

### **Penanggung Jawab:**

PPIM UIN Jakarta; UNDP Indonesia

### **Penulis:**

Debbie Affianty, Abdallah dan Arief Subhan

### **Tim Peneliti:**

Deden Mauli Darajat, Debbie Affianty, Ida Rasyidah, Tantan Hermansyah, Tati Rohayati,  
Zainal Muttaqien.

Abrar, Akhwan Ali, Iif Fikriyati Ihsani, Mukti Ali, Rini Apriantini

### **Desain Cover & Layout:**

Oryza Rizqullah

### **ISSN:**

977-272-38070-0-6

### **Penerbit:**

PPIM UIN Jakarta

Jalan Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Ciputat 15419

Kota Tangerang Selatan Banten 15419 INDONESIA

Telp. (62 21) 749-9272

Email: [ppim@uinjkt.ac.id](mailto:ppim@uinjkt.ac.id)

## UCAPAN TERIMA KASIH

CONVEY REPORT ini ditulis untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang temuan penelitian dari riset tentang Menakar Ketahanan dan Kerentanan *homeschooling* (HS) terhadap Radikalisme di Indonesia. Penelitian ini merupakan bagian dari program Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) di Indonesia, yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta di enam Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan.

Penelitian ini berfokus pada menganalisa potensi HS sebagai lahan subur untuk mengembangkan ide ekstremisme kekerasan dan juga potensi HS sebagai sarana mencegah penyebaran kekerasan ekstremisme. Penelitian ini sangat tepat waktunya dengan adanya kecenderungan berkembangnya pelibatan anak-anak dalam aksi bom bunuh diri di beberapa daerah di Indonesia. HS dalam hal ini seringkali dijadikan sebagai sarana kelompok-kelompok tertentu untuk menanamkan nilai-nilai dan gagasan intoleransi, ujaran kebencian, paham radikalisme yang berujung pada ekstremisme kekerasan.

Atas nama tim peneliti, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Project Management Unit di PPIM UIN Jakarta and UNDP Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung penelitian ini. Apresiasi sebesar-besarnya kami haturkan kepada Penasehat PPIM Prof. Jamhari Makruf, Direktur Eksekutif PPIM Dr. Ismatu Ropi, serta peneliti senior PPIM Dr. Didin Syafruddin, Dr. Fuad Jabali, dan Dr. Arief Subhan yang telah memberikan supervisi terhadap proses penelitian ini sejak desain instrumen riset, pengumpulan data, penulisan laporan sampai dengan diseminasi hasil penelitian. Demikian juga apresiasi yang mendalam kepada Dr. Arief Subhan selaku editor yang telah secara teliti mengedit dan memberikan masukan bagi CONVEY REPORT ini. Terakhir, apresiasi yang mendalam kepada semua peneliti, asisten peneliti, staf pendukung tim peneliti dan mitra penelitian yang telah mengabdikan waktu dan pemikirannya selama enam bulan pelaksanaan penelitian ini. Tanpa kerja keras semua pihak, CONVEY REPORT ini tidak pernah ada.

Ciputat, 20 Januari 2020

**Penulis**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Survei nasional PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 dan 2018 menyebutkan bahwa intoleransi dan radikalisme tumbuh di banyak sekolah dan kampus, tidak hanya di kalangan siswa/mahasiswa tetapi juga guru/dosen. Jika dilihat dari *trajectory* kasus ekstremisme kekerasan dan aksi terorisme di Indonesia, penanaman dan penyebaran paham keagamaan sempit yang seringkali melahirkan sikap dan tindakan intoleransi dan ekstremisme kekerasan sebagian besar berasal dari keluarga. Hal ini terutama jika keluarga tersebut memiliki sejumlah kekecewaan terhadap sistem yang ada akibat persepsi tentang ketidakadilan, yang berujung pada perasaan termarginalisasi secara ekonomi dan politik serta adanya interpretasi keagamaan yang *anti-mainstream*.

Berkaca pada kasus bom Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga di mana anak-anaknya dididik dengan metode *homeschooling*, penelitian ini akan mencoba melihat keberadaan, praktek dan kebijakan tentang *homeschooling* di enam provinsi di Indonesia, apakah dapat memperkuat daya tahan masyarakat atau justru menimbulkan kerentanan terhadap paham radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Benarkah *homeschooling* menjadi pusat tumbuh kembang paham radikalisme? Sejauhmana *homeschooling* mengikuti kurikulum nasional dan dapat menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan mencegah intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme kekerasan? Apakakah permasalahan dan tantangan *homeschooling* untuk berperan mengembangkan toleransi dan pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan?

Permendikbud 129/2014 merupakan satu-satunya peraturan dan landasan hukum di Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan *homeschooling* di Indonesia. Definisi *homeschooling* pada penelitian ini merujuk pada Permendikbud No. 129/2014 yang menyebutkan sekolahrumah (*homeschooling*) adalah “layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana kondusif agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.” Penelitian ini berasumsi bahwa *homeschooling* memiliki potensi untuk menciptakan apa yang disebut oleh Della Porta sebagai “*spiral of encapsulations*” yaitu pengucilan diri yang semakin lama semakin dalam dan menyendiri sehingga menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum kewargaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketahanan dan kerentanan *homeschooling* terhadap radikalisme. Penelitian ini memakai indikator radikalisme dalam konteks pendidikan, yaitu adanya (1) penolakan secara ideologis NKRI dalam berbagai bentuknya; (2) intoleransi terhadap keragaman; (3) penolakan untuk berinteraksi dengan komunitas lain yang berbeda; dan (4) mendukung kekerasan dalam berbagai bentuknya. Tolok ukur yang dipakai untuk menentukan kerentanan terhadap radikalisme adalah: (1) tidak menerapkan kurikulum nasional (sebagaimana disyaratkan oleh Permendikbud No. 129 Tahun 2014); (2) tidak melakukan upacara bendera Merah-Putih; (3) tidak mengenalkan simbol-simbol negara; dan (4) tidak terbuka terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda. Sedangkan untuk tolok

ukur ketahanan, mencakup: (1) mengajarkan pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia (sesuai dengan Permendikbud No. 129 Tahun 2014); (2) penerapan kurikulum nasional; (3) terbuka terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda.

Penelitian ini melibatkan 53 *homeschooling* yang tersebar di enam provinsi yang berbeda, yaitu (1) DKI Jakarta dan kota-kota di sekitarnya (Depok dan Tangerang Selatan), (2) Jawa Barat; (3) Jawa Tengah; (4) Jawa Timur; (5) Makassar; dan (6) Sumatera Barat. Dari 53 *homeschooling* tersebut 21 berbasis keluarga (tunggal), 12 berbasis beberapa keluarga (majemuk) dan 20 berbasis komunitas. Penelitian ini melibatkan 129 informan yang terdiri dari praktisi *homeschooling* dan dinas pendidikan setempat, 85 orang di antaranya adalah perempuan dan 44 orang lainnya laki-laki.

Ada beberapa temuan dalam penelitian ini. **Pertama**, saat ini Dinas Pendidikan di tingkat kota hanya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *homeschooling* yang berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (HS berbasis komunitas) karena termasuk ke dalam wilayah pendidikan non-formal. Sedangkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *homeschooling* tunggal (dijalankan oleh keluarga), dan *homeschooling* majemuk (dijalankan oleh beberapa keluarga), mereka mengalami kesulitan karena keduanya termasuk ke dalam wilayah pendidikan informal yang berada di luar kendali pemerintah.

**Kedua**, dengan adanya desentralisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keberadaan keluarga-keluarga praktisi *homeschooling*, hal ini dikarenakan wewenang tersebut sudah didelegasikan ke Dinas Pendidikan di tingkat daerah. Pada prakteknya, Dinas Pendidikan di tingkat kota tidak memiliki database yang akurat tentang jumlah dan keberadaan *homeschooling* tunggal dan majemuk di wilayahnya. Mereka hanya memiliki data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang biasanya menaungi *homeschooling* komunitas.

**Ketiga**, *homeschooling* (HS) pada perkembangannya memiliki beberapa varian. Hasil penelitian ini menunjukkan secara garis besar HS dapat dikelompokkan dalam dua tipologi besar. Pertama, HS berbasis non-agama. Secara konseptual, HS kategori ini terdiri dari praktisi *homeschooling* yang memiliki alasan non-agama, seperti minat, bakat, dan kebutuhan anak, dalam memiliki HS sebagai metode belajar. Kedua, HS berbasis agama yang terdiri dari praktisi *homeschooling* yang menjadikan ajaran agama sebagai argumen utama dalam memilih metode belajar, termasuk dalam merumuskan konten pembelajaran. HS berbasis agama ini terbagi menjadi HS “berbasis-Kristen” dan HS “berbasis Islam”. Sedangkan HS berbasis Islam terbagi menjadi HS Salafi Inklusif dan HS Salafi Eksklusif. Definisi Salafi dalam konteks ini adalah: (1) bentuk praktek pendidikan yang diajarkan pada periode as-salaf al-shalih; (2) menggunakan referensi literature salafi dalam pelajaran islam; dan (3) menjadikan tahfidz al Qur’an sebagai materi pokok.

**Keempat**, ada beberapa perbedaan antara HS Salafi Inklusif dan HS Salafi Eksklusif, yaitu: (1) HS Salafi inklusif memperkenalkan keragaman Indonesia sedangkan HS Salafi Eksklusif fokus pada kelompoknya sendiri; (2) HS Salafi Inklusif bersedia bergaul dengan pemeluk agama selain Islam, sedangkan HS Salafi Eksklusif tidak bergaul dengan pemeluk agama selain Islam;

(3) HS Salafi Inklusif menerapkan kurikulum nasional (termasuk mata pelajaran Pancasila, PPKN dan Bahasa Indonesia), sedangkan HS Salafi Eksklusif menerapkan kurikulum sendiri karena kurikulum nasional hanya dipelajari sesaat untuk kepentingan ujian penyetaraan; (4) HS Salafi Inklusif menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain, namun bias menerima jika ada yang melakukan. Sedangkan HS Salafi Eksklusif, menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain dan secara mutlak menolaknya.

**Kelima**, berdasarkan tolok ukur kerentanan dan ketahanan terhadap radikalisme yang menjadi temuan dalam penelitian ini, ada dua fakta: (1) siswa-siswa yang berada di HS berbasis non-agama dan HS Islam Inklusif, baik majemuk maupun komunitas, memiliki ketahanan diri dari paparan ideology keagamaan radikal; (2) siswa-siswa yang berada pada HS tunggal berbasis Islam Salafi Eksklusif memiliki kerentanan terhadap radikalisme karena mengalami spiral pengucilan diri.

## REKOMENDASI

Upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat sipil. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan para pemangku kebijakan dapat memformulasikan kebijakan yang tepat dan relevan dalam meningkatkan kualitas *homeschooling*, menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta menghormati keragaman dan perbedaan. Penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah, pemangku kebijakan, asosiasi penyelenggara *homeschooling*, serta masyarakat umum di Indonesia:

### Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Permendikbud Nomor 129/2014, terutama tugas pokok dan fungsi dinas terkait dengan pembinaan dan pengawasan *homeschooling* di wilayah tingkat kota.
2. Membentuk struktur khusus di pusat dan dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dengan mandat monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh HS Komunitas (termasuk perijinan, kurikulum, pendidik, sarana prasarana, dan lingkungan).
3. Mempermudah mekanisme pendaftaran HS tunggal dan HS majemuk dengan menggunakan *one-single online submission* oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga pihak pemerintah memiliki database yang komprehensif.
4. Merumuskan sistem penjaminan mutu pelaksanaan UNPK dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
5. Bekerja sama dengan dinas pendidikan tingkat kota memperkuat pendidikan sebagai alat untuk moderasi beragama, melalui pengembangan kurikulum dan pelatihan tutor *homeschooling*.
6. Menyediakan fasilitas bagi siswa-siswa HS bersosialisasi untuk mengenal, bergaul serta berinteraksi dengan kelompok dari berbagai latar belakang untuk menyemaikan nilai toleransi dan kebangsaan.



## **Kementerian dalam Negeri**

1. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi kepada kepala daerah tingkat kabupaten/kota terkait dengan pembinaan dan pengawasan keluarga praktisi *homeschooling* oleh Dinas Pendidikan tingkat kota.
2. Bekerjasama dengan kepala daerah, DPRD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menyusun peraturan daerah serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga praktisi *homeschooling* untuk menjunjung tinggi identitas nasional, menghargai keragaman dan perbedaan, serta melakukan interaksi sosial secara inklusif.

## **Asosiasi Penyelenggara *Homeschooling***

1. Mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang menghargai keragaman dan perbedaan latar belakang etnis, agama dan status sosial melalui pengembangan kurikulum yang inklusif.
2. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di tingkat kota, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas keluarga-keluarga praktisi *homeschooling* terkait dengan mutu dan isi pembelajaran yang menekankan pada identitas nasional, inklusivitas, toleransi dan moderasi beragama.

## **Keluarga Praktisi *Homeschooling***

1. Mendorong anak-anak *homeschooling* untuk berpikir kritis, memiliki nasionalisme, memiliki rasa empati dan menghormati keragaman dan perbedaan.
2. Membuka wawasan anak-anak *homeschooling* dengan mengunjungi rumah-rumah ibadah, serta mempelajari seni, makanan, dan budaya dengan mengundang ataupun mengunjungi orang-orang yang berbeda latar belakang dengan keluarga praktisi *homeschooling* tersebut.

## DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
LATAR BELAKANG .....	1
TINJAUAN LITERATUR .....	4
PENDEKATAN DAN METODE .....	6
DEFINISI DAN KONSEP.....	11
TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS.....	13
Regulasi Negara terkait <i>Homeschooling</i> .....	13
Kategori dan Tipologi <i>Homeschooling</i> .....	14
Menakar Ketahanan dan Kerentanan <i>Homeschooling</i> .....	26
GENDER .....	33
KESIMPULAN .....	35
REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	37
PROFIL PENULIS .....	40
PROFIL LEMBAGA .....	41

## LATAR BELAKANG

Intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Survei nasional PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 dan 2018 menyebutkan bahwa intoleransi dan radikalisme tumbuh di banyak sekolah dan kampus. Survei PPIM pada tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas anak muda Indonesia (siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa) cenderung memiliki pandangan yang radikal. Temuan penelitian tersebut menunjukkan 58,5% dari siswa/mahasiswa tersebut radikal dalam sikap /opini dan 51,1% dari para responden cenderung intoleran terhadap mereka yang “liyan” atau berbeda pandangan dalam Islam dan 34,3% dari mereka intoleran kepada penganut agama lain. Namun demikian, terdapat paradoks dalam tindakan mereka. Sebagian besar siswa/mahasiswa tersebut berada pada tingkat moderat (74,2%) di tingkat aksi. Mereka cenderung lebih moderat dan toleran kepada non-Muslim (62,9%) daripada pengikut Ahmadiyah atau Syi’ah (33,2%) (Syafuruddin, 2018).

Bagaimana dengan pendidikan usia dini? Terkait dengan pendidikan pra-sekolah, Survei Nasional PPIM 2018 menemukan kenyataan bahwa guru-guru TK (Taman Kanak-Kanak) mempunyai pandangan keagamaan yang lebih radikal dan intoleran dibandingkan dengan guru-guru agama di SMP dan SMA, antara lain dalam bentuk aspirasi pendirian khilafah dan penolakan untuk bertetangga dengan non-Muslim (Yunita, 2019). Di samping itu, laporan-laporan media massa cetak dan *online* juga menyebutkan bahwa kelompok-kelompok radikal di Indonesia telah menanamkan pandangan-pandangan radikalnya sejak masa pendidikan usia dini yang ditempuh anak-anak. Seorang guru TK di Yogyakarta, sebagai contoh, mengajarkan yel-yel kepada anak-anak TK: “Islam yes kafir no, Islam yes kafir no.” Pada momen Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI bulan Agustus 2018, sebuah TK di Bojonegoro, Jawa Tengah, mengikuti pawai di jalan raya kota dengan seluruh anak perempuan mengenakan *niqab* (menutup seluruh bagian tubuh kecuali mata) sebagai kostum dan membawa replika senjata. Peristiwa itu diliput media massa nasional (Tribunnews; Republika; Liputan6, 2018). Hal tersebut ditambah dengan temuan penelitian PPIM terhadap buku-buku teks TK yang terbit di kota Solo yang di dalamnya terdapat bagian yang memperkenalkan beberapa elemen yang terkait dengan *jihad* (perang melawan musuh-musuh Islam) kepada anak-anak seperti “bom”, “topi baja”, “gegana”, and “kamikaze” (Nasuhi [eds.], 2018, p.41).

Hal yang paling mengejutkan kemudian adalah beberapa kejadian bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak di Indonesia semakin sering terjadi. Seorang anak berusia dua tahun diikutsertakan dalam aksi bom bunuh diri oleh ibunya pada 13 Maret 2019 di Sibolga, Sumatera Utara, ketika mereka harus menyerahkan diri ke petugas ([www.suara.com](http://www.suara.com)). Sang ibu, Solimah, merupakan istri dari terduga teroris Abu Hamzah. Setahun sebelumnya (2018), dua anak perempuan dan dua anak laki-laki, menjadi pelaku bom bunuh diri di dua gereja yang terpisah di Surabaya. Anak-anak perempuan tersebut diikutsertakan oleh ibu mereka (Puji Kuswati, 43 tahun) sedangkan kedua anak laki-laki tersebut diperintahkan untuk meledakkan diri di sebuah gereja oleh ayah mereka yang juga meledakkan diri di gereja lain di lokasi yang terpisah

(tribunnews.com). Belakangan diketahui bahwa anak-anak keluarga pelaku bom Surabaya tersebut dididik dengan metode *homeschooling* (www.republika.com). Berkaca dari kasus ini, pendidikan non sekolah berbasis keluarga, sepertinya, rentan menjadi sarana penanaman paham keagamaan sempit yang pro terhadap kekerasan.

Secara historis, salah satu alasan utama *homeschooling* adalah untuk menjaga dan memelihara kepercayaan dan nilai-nilai keluarga. Orang tua, yang mempraktikkan *homeschooling*, tidak menginginkan anak-anaknya mendapatkan penanaman nilai selain nilai yang diyakini keluarga. Praktek *homeschooling* di kalangan penganut Kristen konservatif di Amerika Serikat, menurut Kunzman (2010), mendukung prinsip-prinsip utama dari kalangan fundamentalis, yaitu: resistensi terhadap budaya kontemporer, curiga terhadap otoritas lembaga dan keahlian profesional, kendali dan sentralitas orangtua di keluarga; serta adanya kaitan antara keimanan dan akademik. Selain itu, mereka juga menolak nilai-nilai demokrasi. Selain itu, mereka yang mendukung *homeschooling* di AS adalah kalangan masyarakat yang merasa keberatan dengan sekularisasi sekolah-sekolah umum; para orang tua pelaku *homeschooling* juga bertujuan untuk fokus mendidik anak-anaknya berdasarkan keunikan tertentu bakat mereka; atau ada juga yang memandang lembaga sekolah tidak lagi memiliki kekuatan yang memadai dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan etika; atau mereka yang keberatan dengan cara yang ditempuh sekolah dalam memperlakukan anak-anak (Loy Kho, 2007; Seto Mulyadi, 2007).

Sejalan dengan temuan penelitian di atas, Basham et. all (2007) mengungkap sejumlah alasan di balik terus meningkatnya kecenderungan *homeschooling* di kalangan keluarga di AS dan Kanada, yakni adanya kesempatan bagi keluarga untuk menanamkan nilai dan keyakinan tertentu bagi anak-anak mereka, daya dongkrak akademik bagi peserta yang lebih tinggi melalui model instruksi satu guru-satu murid, tersedianya peluang hubungan orang tua-anak lebih dekat dan kuat, tersedianya kesempatan bagi anak melakukan interaksi berkualitas dengan orang dewasa dan teman sebaya, kurangnya kedisiplinan di sekolah umum, kontrol lebih kuat atas anak (peserta didik) terhadap dampak negatif pergaulan, biaya pendidikan yang relatif sesuai kemampuan keluarga, dan lingkungan belajar yang lebih aman bagi peserta didik.

Basham juga menangkap kecenderungan dua jenis keluarga Amerika dan Kanada yang tertarik menggunakan *home schooling*, yaitu jenis keluarga ideolog dan keluarga pedagog. Kendati tidak bisa dikelompokkan secara khusus, namun jenis keluarga ideolog adalah keluarga yang cenderung memiliki pandangan dan praktik keagamaan yang konservatif, sedangkan jenis keluarga pedagog adalah jenis keluarga yang memprioritaskan peningkatan kualitas akademik dan kehidupan sosial anak-anaknya. Orang tua atau penjaga anak (*parents or guardians*) menekankan tanggungjawabnya mendidik anak mereka dengan mengembangkan panduan kurikulum sendiri dengan menggunakan dukungan sumber-sumber pembelajaran lokal dan virtual yang sesuai.

Temuan riset Basham tersebut mencatat keberadaan *homeschooling* sebetulnya sudah berakar jauh dalam sejarah pendidikan Amerika dan bisa ditelusuri keberadaannya di dekade 1870-an. Beberapa tokoh politik dan pemerintahan AS seperti George Washington, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, dan Franklin Delano Roosevelt adalah beberapa produk home schooling dalam sejarah AS. Di era belakangan, 1960-1970-

an, *homeschooling* terus mencatatkan popularitasnya sebagai model pendidikan alternatif keluarga AS, termasuk juga keluarga di Kanada, yang menggambarkan keluarga dari populasi sosial homogen, sangat religius, dan bersikap konservatif. Era pertengahan dekade 1980-an, misalnya, *homeschooling* dinilai sebagai model tepat pendidikan untuk memelihara nafas ke-Kristenan sebelum kemudian keluarga Muslim Amerika menjadi kelompok sosial yang paling cepat mencatatkan pertumbuhan pemanfaatan model pendidikan *homeschooling*. Dengan popularitas demikian, *homeschooling* juga diakui dan diakomodir dalam regulasi dan kebijakan pendidikan AS dan Kanada, selain lembaga pendidikan publik, swasta, dan tipe-tipe sekolah lainnya.

Sementara itu Myers & Bhopal (2018) memperoleh temuan riset bahwa keluarga Muslim di Inggris yang diwawancarai mengambil model pendidikan di rumah dengan alasan yang lebih spesifik. Salah satunya yang paling utama adalah tekanan rasisme dari kelompok sosial dan anak-anak kulit putih setempat terhadap anak-anak Muslim di lingkungan sekolah bahwa anak-anak terakhir merepresentasikan kedekatan dengan kelompok terorisme Islam. Pada kasus keluarga Siddiq dan Rabeeha misalnya, tuduhan atas mereka sebagai keluarga Muslim yang memiliki kedekatan teologis dengan kelompok teroris (Islam) dan julukan 'putera-puteri Bin Laden' menandai sikap rasisme masyarakat sekitar yang mendorong keluarga Muslim memberi pengajaran *home education* bagi anak-anaknya. Di saat yang sama, kecenderungan ini juga ditopang keinginan mereka menjadikan *home education* sebagai sarana melindungi dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan (Islam) bagi anak-anak mereka. Upaya ini dinilai penting sebagai sarana memelihara identitas sosial mereka sebagai bagian dari entitas Muslim. Dengan kedua faktor ini, keluarga Muslim akhirnya lebih memilih *home education* bagi anak-anaknya yang memungkinkan anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan, terhindar dari aksi rasisme, serta di saat yang sama menjadi sarana aktualisasi sekaligus pemeliharaan nilai-nilai dan identitas Islam bagi generasi mudanya.

Temuan pada keluarga Muslim tersebut melengkapi temuan riset Myers & Bhopal yang dilakukan secara lebih luas pada keluarga-keluarga kelompok sosial lain di mana pendidikan di rumah diambil sebagai alternatif mendidik anak-anak mereka. Pada keluarga dengan kemampuan modalitas yang mapan (baik ekonomi, status sosial, maupun budaya), pendidikan *home education* merupakan bagian dari upaya mereka meningkatkan status gaya hidup (*lifestyle*). Sedang bagi keluarga dengan modalitas terbatas, pendidikan *home education* menjadi alternatif yang mereka ambil atas kesulitan mereka mengakses pendidikan di lembaga pendidikan formal. Namun secara umum, kedua kelompok sosial ini sepakat bahwa *home education* bisa menjadi respon ketidakpuasan mereka terhadap kelemahan sistem pendidikan formal seperti model pengajaran yang buruk dan tekanan tes (evaluasi belajar) yang berlebihan.

Dalam konteks Indonesia, *homeschooling* pada awalnya di Indonesia dikenal luas di kalangan anak-anak yang memiliki minat, bakat dan berkegiatan di bidang seni (penyanyi), olahraga (atlet), dan bidang non akademik lainnya. Hal ini karena metode *homeschooling* dianggap memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka tidak terikat dengan jam pelajaran. *Homeschooling* kemudian menjadi alternatif lain selain pendidikan jalur sekolah seiring dengan maraknya kejadian perundungan (*bullying*) di sekolah dan juga untuk memenuhi hak

belajar dari anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Memasuki tahun 2000-an, *homeschooling* semakin banyak diminati oleh kalangan urban dan kelas menengah karena dapat memberikan pendidikan yang *customized* sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Namun demikian, penelitian tentang kaitan antara *homeschooling* dan radikalisme tidak banyak dieksplorasi di Indonesia.

Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba melihat keberadaan, praktek dan kebijakan tentang *homeschooling* di Indonesia, apakah dapat memperkuat daya tahan masyarakat atau justru menimbulkan kerentanan terhadap paham radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Benarkah *homeschooling* menjadi pusat tumbuh kembang paham radikalisme? Sejauhmana *homeschooling* mengikuti kurikulum nasional dan terlibat menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan mencegah intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme kekerasan? Apakakah permasalahan dan tantangan *homeschooling* untuk berperan mengembangkan toleransi dan pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan? Dua hal menjadi fokus penelitian ini. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan dan respons stakeholder, antara lain guru, pengelola komunitas, dan orang tua tentang *homeschooling*. Kedua, akan menguji model pendidikan *homeschooling* dari aspek regulasi, kurikulum, pedoman, dan buku teks yang dipergunakan dari perspektif radikalisme dan ekstrimisme yang mendorong ekstremisme kekerasan.

## TINJAUAN LITERATUR

Apakah tidak berlebihan mengaitkan HS dengan radikalisme agama dengan hanya merujuk indikasi kejadian “bom Surabaya”? Berikut beberapa penelitian lain yang juga fokus pada HS dan soal keagamaan sehingga tema penelitian ini menjadi penelitian yang masuk akal dan tidak berlebihan.

Tabel 1  
Tinjauan Literatur

No.	Literatur	Konten
1.	Robert Kunzman, “ <i>Homeschooling and Religious Fundamentalism</i> ” (2010);	HS menyediakan latar pendidikan yang ideal untuk mendukung beberapa prinsip pokok fundamentalis: resistensi terhadap budaya kontemporer; kecurigaan terhadap otoritas institusional dan keahlian profesional; kontrol orang tua dan sentralitas keluarga; dan penekanan pada jalinan antaraiman dan kehidupan akademis; dalam pengertian, kehidupan intelektual hanya akan bermakna jika sejalan dengan doktrin agama. Sangat penting mengenali HS yang berkecenderungan fundamentalis dengan baik mengingat fundamentalisme berada dalam suatu kontinum; karenanya tidak tepat melakukan generalisasi. Sikap yang tepat adalah upaya mendorong dialog dan akomodasi terhadap pelaku <i>homeschooling</i> berbasis agama untuk memperkuat struktur kewarganegaraan yang lebih luas.

2.	Martin Myers and Kalwant Bhopal, "Muslims, Home Education and Risk in British Society" (2018);	<p>Dengan metode studi kasus dan teknik <i>snowball</i>, mereka mengeksplorasi enam keluarga Muslim di London UK yang merupakan bagian dari 33 keluarga yang menjadi narasumber penelitian. Mereka menemukan alasan spesifik mengapa mereka memilih HS. Pertama, dan yang utama, adalah tekanan rasisme dari kelompok sosial dan anak-anak kulit putih setempat yang mempersepsi mereka sebagai representasi terorisme Islam. Kedua, HS merupakan sarana untuk melindungi dan mewariskan nilai-nilai Islam yang diyakini keluarga yang sekaligus dimaksudkan sebagai sarana memelihara identitas sosial mereka sebagai bagian dari entitas Muslim (<i>ummah</i>). Untuk kasus keluarga lain di lokasi yang sama, penelitian ini juga menemukan bahwa pada keluarga yang kaya, HS merupakan bagian dari upaya meningkatkan status gaya hidup (<i>lifestyle</i>). Sedang bagi keluarga dengan modalitas terbatas, HS menjadi alternatif karena sulitnya akses mereka terhadap lembaga pendidikan formal. Dua hal tersebut merupakan alasan memilih <i>homeschooling</i> sebagai bentuk respon terhadap sistem pendidikan formal.</p>
3.	Patrick Basham, John Merrifield, and Claudia R. Hepburn, <i>Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream</i> (2007);	<p>Penelitian ini mengidentifikasi latar belakang kecenderungan orang tua di Amerika Serikat dan Kanada terhadap HS. Identifikasi dimulai dari definisi HS, sejarah perkembangannya di kedua negara tersebut, kebijakan dan tata kelola yang dirumuskan, performa akademik peserta didik HS, dan karakteristik keluarga yang memilih HS. HS di kedua negara tersebut didefinisikan sebagai kegiatan pendidikan bagi anak usia sekolah (<i>school-aged children</i>) yang dilakukan di rumah alih-alih di sekolah. Kegiatan pendidikan ini muncul ketika seorang anak (usia sekolah) melakukan partisipasi pendidikannya di lingkungan rumahnya dibanding ikut serta dalam proses pendidikan di sekolah publik, swasta, atau tipe-tipe sekolah lainnya. Sedangkan di saat yang sama, orang tua atau pengasuh anak (<i>parents or guardians</i>) menekankan tanggungjawab pendidikan anaknya dengan mengembangkan panduan kurikulum sendiri dan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran lokal dan virtual yang sesuai.</p>

4.	Maryono, “ <i>Islamic Homeschooling Upaya Membangun Karakter Islami (Studi Kasus Islamic Homeschooling Fatanugraha Wonosobo</i> ” (2013);	Penelitian ini menemukan tiga faktor yang menyebabkan popularitas HS. Pertama, pandangan bahwa sekolah formal dianggap gagal memberikan pendidikan yang bermutu, dan HS merupakan layanan pendidikan yang dapat memberikan solusi. Kedua, motivasi orang tua untuk meningkatkan kecerdasan anaknya yang tidak bisa dipenuhi sekolah formal. Ketiga, pemenuhan pendidikan karakter Islami anak yang sejalan dengan kebutuhan akademiknya. Maryono mencatat bahwa faktor terakhir menjadi motif paling kuat di kalangan orang tua. Apalagi dalam kasus HS Fatanugraha—yang barangkali menjadi daya tarik—pengembangan karakter ditempuh dengan dua cara: adopsi materi pesantren dalam bentuk kajian kitab kuning dan memberikan keteladanan ( <i>‘uswah hasanah</i> ) melalui akhlak para tutor.
5.	Ichsan Wibowo Saputro, <i>Ideologi Pendidikan Islam di Homeschooling: Kajian Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implikasinya di Homeschooling Group Khoiru Ummah</i> (2017), tesis Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;	Penelitian ini mengaitkan HS yang memiliki cabang di beberapa kota dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Peneliti tidak hanya memaparkan pertautan antara ideologi pendidikan Islam HS Group Khoiru Ummah dengan ideologi Gerakan Islam HTI, tetapi juga menyimpulkan bahwa HS Group Khoiru Ummah sebagai bentuk jaringan gerakan sosial keagamaan dengan HTI sebagai organisasi penggerak di belakangnya.

## PENDEKATAN DAN METODE

Untuk menganalisa sejauh mana *homeschooling* (HS) dapat menjadi sarana penyebaran paham intoleransi dan radikalisme atau malah menjadi sarana penangkal paham tersebut, penelitian ini mencoba melihat bagaimana kebijakan pemerintah tentang *homeschooling* diimplementasikan di enam provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2019, dengan melibatkan enam peneliti dan enam asisten peneliti. Penelitian diawali dengan studi dokumen, dilanjutkan dengan observasi dan wawancara mendalam yang melibatkan sebanyak 129 informan, yang terdiri dari 85 Perempuan dan 44 laki-laki. Informan didapatkan dengan metode *snowball*. Proses pemilihan HS ditentukan secara *snowballing* dengan argumen masih kurangnya data nasional dan regional (provinsi atau kabupaten/kota) tentang HS di Indonesia. Tiga bentuk HS yang disebutkan dalam Permendikbud No. 129 Tahun 2014, yaitu model layanan HS Tunggal dan HS Mejemuk, dan HS Komunitas akan ditelusuri dan ditentukan dengan pendekatan *snowballing*. Secara keseluruhan ada 53 *homeschooling* yang dilibatkan dalam pengambilan data, termasuk 21 HS tunggal, 12 HS majemuk dan 20 HS komunitas).

Dalam proses, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana peraturan pemerintah diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat



kota serta mengidentifikasi aktor-aktor kunci (pengelola, orangtua, dan tutor) yang dapat mempengaruhi siswa dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan intoleransi dan radikalisme. Untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan, Penelitian ini menerapkan pendekatan dan model kualitatif. Tanpa berniat membuat generalisasi, penelitian ini menggali secara mendalam (*in-depth study*) gejala penting di dunia pendidikan yang dikenal dengan HS. Agar riset ini berhasil menyajikan deskripsi yang representatif, maka telah dilakukan pengambilan data, di samping wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pelaku HS (Tunggal, Majemuk, dan Komunitas) dan pemangku kebijakan (Penilik PNF dan Dinas Pendidikan PNF) di masing-masing wilayah, juga telah dilakukan observasi (*observation*) terhadap ketiga jenis layanan pendidikan tersebut, analisis dokumen (regulasi, materi ajar dan kurikulum), serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Tim peneliti mengadakan Focused Group Discussion (FGD) dengan mengundang pembuat kebijakan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BNPT), pengelola PKBM, serta perkumpulan dan asosiasi *homeschooling* yang terlibat dalam pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan *homeschooling*. Mereka mendiskusikan bagaimana membangun ketahanan *homeschooling* dari bahaya penyebaran paham radikalisme dan bagaimana membuat *homeschooling* yang inklusif, mengedepankan dialog, mempromosikan nilai-nilai nasional dan kearifan lokal, serta mencegah radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) kota/kabupaten di 6 (enam) provinsi yang dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan beberapa argumen. Antara lain, *pertama*, kedekatan kota tersebut dengan gerakan-gerakan keagamaan. *Kedua*, catatan yang diberikan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tentang wilayah-wilayah yang rentan terhadap radikalisme. Berdasarkan temuan, studi ini menemukan jenis dan kategori *homeschooling* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2  
Jenis HS

Wilayah	KATEGORI		
	HS Tunggal	HS Majemuk	HS Komunitas
Jadetangsel	4	3	3
Bandung	6	4	2
Solo	3	0	5
Surabaya	3	3	4
Makassar	2	1	3
Padang	3	1	3
TOTAL	21	12	20

Tabel 3  
 Cakupan Wilayah

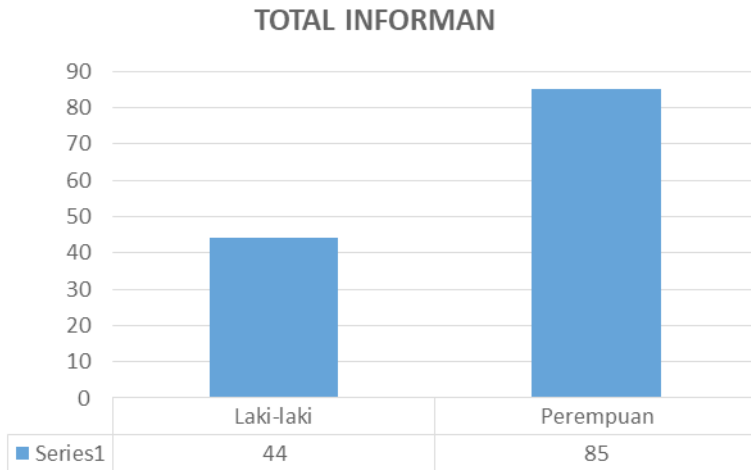
No.	Daerah	Jenis	Responden	Kategori
1.	Jadetangsel (10 HS = 3 agama -Islam eksklusif, 2 agama - Islam inklusif, 1 agama – Kristen, 4 non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Ana	Agama - Islam Salafi Eksklusif
			HS Tunggal Nana	Agama - Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Nada	Agama - Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Radit	Non-Agama
		HS Majemuk	HS Karunia Indah	Agama - Islam Salafi Eksklusif
			HS Pahlawan	Agama - Islam Salafi Eksklusif
			HS Teladan	Non-Agama
		HS Komunitas	PKBM Bina Insan Mandiri (Master)	Non-Agama
			Eagle Nest Homeschooling	Agama - Kristen
			PKBM Bina Potensi Insan Mandiri	Non-Agama
2.	Bandung, Jawa Barat (12 HS = 1 Agama- Islam Salafi Eksklusif, 6 Agama-Islam Salafi Inklusif, 1 Agama-Kristen, 4 Non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Sari	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Nia	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Ria	Non Agama
			HS Tunggal Tina	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Widya	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Nadin	Agama – Kristen
		HS Majemuk	HS Telaga	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Bersama	Non-Agama
			HS Gotong Royong	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Belantara	Agama – Islam Salafi Eksklusif

		HS Komunitas	HS Pewaris Bangsa	Non-Agama
			HS Taman Sekar	Non-Agama
3.	Solo, Jawa Tengah (8 HS: 1 Agama – Islam Salafi Eksklusif; 4 Agama – Islam Salafi Inklusif; 3 Non-Agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Anugerah	Non-Agama
			HS Tunggal Cahaya Setia	Non-Agama
			HS Tunggal Wangi Melati	Agama-Islam Salafi Inklusif
		HS Komunitas	HS Kak Seto	Non-Agama
			Kuttab Ibnu Abbas	Agama – Islam Salafi Eksklusif
			HS Cahaya Rejeki	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Ar-Ridho	Agama – Islam Salafi Inklusif
Syifa	Agama – Islam Salafi Inklusif			
4.	Surabaya, Jawa Timur (10 HS = 1 agama – Islam salafi eksklusif, 3 agama – Islam salafi inklusif, 1 agama Kristen, 5 non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Unggul	Non-Agama
			HS Tunggal Al-Khair	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Azmi	Non-Agama
		HS Majemuk	HS Duta Bangsa	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Bunga Mawar	Non-Agama
			HS Insan Mulia	Agama – Islam Salafi Inklusif
		HS Komunitas	HS PKBM Primagama Pakuwon	Non-Agama
			HS PKBM Pena Surabaya	Non-Agama
			HS Sinar Mulia Indonesia	Agama - Kristen
			HS Thayyibah	Agama – Islam Salafi Eksklusif

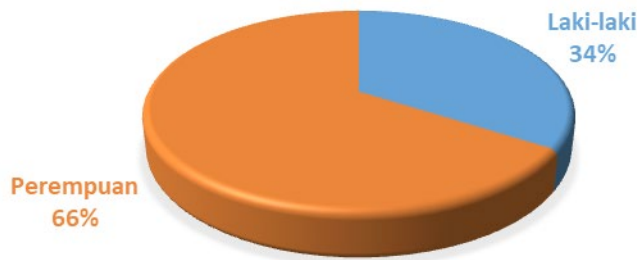
5.	Makassar, Sulawesi Selatan (6 HS = 2 agama –Islam eksklusif, 1 agama – Islam inklusif, 1 agama Kristen, 2 non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Naya	Agama – Islam Salafi Eksklusif
			HS Tunggal Mira	Agama – Islam Salafi Inklusif
		HS Majemuk	HS Kasih Bangsa	Agama – Kristen
		HS Komunitas	HS Cendekia	Non-Agama
			HS Primagama	Non-Agama
			HS Ikhwan	Agama – Islam Salafi Eksklusif
6.	Padang, Sumatera Barat (7 HS = 2 agama – islam eksklusif, 1 agama – Islam inklusif, 4 Non- Agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Hana	Non-Agama
			HS Tunggal Cokro	Non-Agama
			HS Tunggal Ita	Agama – Islam Salafi Inklusif
		HS Majemuk	HS Umat Mulia	Agama – Islam Salafi Eksklusif
		HS Komunitas	PKBM HS Primagama	Non-Agama
			PKBM HS Markazul Quran	Agama – Islam Salafi Eksklusif
			PKBM Farilla Ilmi	Non-Agama
Total 53 HS (21 HS Tunggal, 12 HS Majemuk dan 20 HS Komunitas)				

*Catatan: Nama HS Tunggal dan HS Majemuk disamarkan*

Total informan yang berhasil diwawancarai dalam peneliti adalah 129 informan (85 perempuan dan 44 laki-laki) dengan komposisi: pelaku HS (Tunggal, Majemuk dan Komunitas) dan pemangku kebijakan (penilik PNF dan Dinas Pendidikan PNF). Data ini menunjukkan bahwa informan perempuan lebih banyak dari informan laki-laki. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan HS, sebagaimana diakui oleh beberapa informan, merupakan tanggung jawab seorang ibu dengan berdasarkan pada adagium “ibu adalah sekolah pertama” (*al-umm madrosatu al-ula*).



**PERSENTASE INFORMAN BERDASARKAN  
GENDER**



## DEFINISI DAN KONSEP

Definisi *homeschooling* dalam penelitian ini mengacu pada pengertian SekolahRumah dalam Permendikbud No. 129 Tahun 2014, yaitu “proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal”

Sedangkan pengertian radikalisme dalam penelitian ini adalah ide dan tindakan untuk perubahan sosial politik secara fundamental dan menjustifikasi penggunaan kekerasan, baik verbal maupun aksi, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. menolak secara ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI dalam berbagai bentuknya (termasuk di dalamnya menolak Pancasila, menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menolak hormat kepada bendera Merah-Putih);
2. intoleran terhadap keragaman;
3. menolak berinteraksi dengan komunitas lain yang berbeda (eksklusif);
4. mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dan menganggap dirinya paling benar; dan
5. mendukung kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Untuk mengukur derajat ketahanan terhadap radikalisme, digunakan indikator yang menunjukkan adanya:

1. Implementasi Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang *homeschooling*, dimana penyelenggara mengajarkan mata pelajaran agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2);
2. Penerapan kurikulum nasional;
3. Keterbukaan terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda.

Sedangkan untuk mengetahui adanya kerentanan terhadap radikalisme, digunakan indikator yang menunjukkan bahwa *homeschooling* tersebut:

1. Tidak mengajarkan mata pelajaran agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2);
2. Tidak melakukan upacara bendera Merah-Putih;
3. Tidak mengenalkan pahlawan nasional;
4. Tidak mengajarkan lagu-lagu nasional; dan tidak mengenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, serta lambang burung garuda).

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penelitian ini memiliki asumsi sebagai berikut:

1. Pendidikan—apapun model dan bentuknya—merupakan lahan strategis dalam proses transmisi nilai-nilai, termasuk nilai keagamaan.
2. Strategi pembelajaran yang bersifat fleksibel, menjadikan HS memiliki ketahanan dan kerentanan bagi berlangsungnya proses transmisi dan kultivasi nilai-nilai keagamaan radikal;
3. HS memiliki potensi untuk menciptakan “spiral pengucilan diri” (*spiral of encapsulations*) yang semakin menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (*common values*) kewargaan.

## TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

### Regulasi Negara terkait *Homeschooling*

Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan konstitusi dan operasional untuk penyelenggaraan *homeschooling*. Pertama, UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa ada tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal (jalur persekolahan), pendidikan non formal (jalur luar sekolah) dan pendidikan informal (jalur keluarga atau mandiri). Kedua, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Peraturan Menteri No. 14/2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan. Keempat, Peraturan Menteri No. 3/2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan. Kelima, Peraturan Menteri No. 17/2010 tentang Proses Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Terakhir, Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah.

Permendikbud No. 129/2014 merupakan satu-satunya regulasi tentang HS yang dikeluarkan pemerintah. Regulasi tersebut sudah membuat pembagian tentang bentuk HS (pasal 5), dengan implikasinya dalam penyelenggaraan. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa untuk bentuk HS tunggal dan HS majemuk wajib mendaftar, dan untuk HS komunitas wajib mendapatkan ijin. Akan tetapi, pada Pasal 13 juga disebutkan bahwa “pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap sekolahrumah”. Dengan demikian, tanggung jawab administrasi, pembinaan kualitas, monitoring dan evaluasi sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah, c.q. dinas pendidikan.

Penelitian ini menemukan bahwa dua dari enam kota/kabupaten yang diteliti mengeluarkan peraturan tambahan yang melengkapi atau sebagai turunan Permendikbud No. 129/2014, yaitu Perda Kota Surakarta No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 70, ayat 1-3 dan Perda Kabupaten Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung yang menyebutkan HS. Kepala Dinas Kota Depok—dalam wawancara—pernah mengeluarkan surat himbauan terkait HS pada tahun 2010, tetapi dokumen tersebut dibatalkan oleh Dinas yang sama pada tahun 2011. Dinas Kota Makassar juga menyampaikan bahwa Pemda pernah punya keinginan membuat regulasi tentang HS, tetapi tidak terlaksana.

Dinas Pendidikan yang diteliti juga tidak memiliki data tentang HS di wilayahnya sehingga implementasi Permendikbud (Pasal 6) bahwa HS Tunggal dan HS Majemuk harus mendaftar dengan persyaratan tertentu masih sangat kurang. Berdasarkan kenyataan tersebut, perkembangan HS yang pesat dan beragam kurang diikuti dengan implementasi regulasi sebagai salah satu mekanisme monitoring dan evaluasi dari pemerintah yang bertujuan menjaga dan meningkatkan mutu dan mencegah penanaman ideologi-kegamaan tertentu.

Meskipun di tingkat pusat sudah ada regulasi yang mengatur tentang *homeschooling*, sebagian besar Dinas Pendidikan di tingkat kota belum memahami betul apa yang dimaksud dengan *homeschooling* dan bagaimana mekanisme serta prosedur pembinaan dan pengawasannya.

Penelitian ini menemukan hal tersebut diakibatkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Tidak ada aturan Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan sebagai implementasi regulasi Permendikbud No. 129 Tahun 2014;
- b. Tidak ada database HS;
- c. Tidak ada bagian pada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang bertugas khusus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh HS komunitas;
- d. Kurangnya penjaminan mutu pelaksanaan (UNPKS).

### Kategori dan Tipologi *Homeschooling*

Penelitian ini merumuskan kategori *homeschooling* dari berbagai informan. Berikut tabel di bawah ini adalah kategori *homeschooling* dan jumlah kategori berdasarkan temuan lapangan:

Tabel 4  
 Pemetaan

Nama	Kategori		Keterangan
HS	1. Berbasis non-agama		HS non-agama berbasis pada minat, bakat, dan kebutuhan anak.
	2. Berbasis agama	Berbasis Kristen	HS ini menempatkan agama, baik Kristen maupun Islam, sebagai bagian paling utama dalam program pendidikan.
		Berbasis Islam	

Tabel 5  
 Kategori HS

KATEGORI	NON-AGAMA	AGAMA			TOTAL
		Kristen	ISLAM		
			Salafi Inklusif	Salafi Eksklusif	
Jadetangsel	4	1	2	3	10
Bandung	4	1	6	1	12
Solo	3	0	4	1	8
Surabaya	5	1	3	1	10
Makassar	2	1	1	2	6



Padang	4	0	1	2	7
Sub Total	22	4	17	10	53

Berdasarkan temuan lapangan bahwa pemakanaan kelompok HS berbasis Islam sebagai layanan pendidikan ideal sebagaimana dipraktikkan kaum salaf (*al-salaf al-shalih*), maka penelitian ini membagi HS berbasis Islam dalam dua tipologi besar. Pertama, tipologi HS Salafi-Inklusif. Kedua, tipologi HS Salafi-Eksklusif. Salafi diberikan definisi yang bersifat luas dengan menekankan pada aspek keyakinan bahwa periode al-salaf al-shalih sebagai periode yang harus dirujuk, menekankan pemurnian *tawhid* dan menjauhkan diri pada hal-hal yang membawa pada *syirik*.

<b>Salafi</b>	
Praktik HS dengan merujuk dan meyakinkannya sebagai: (1) bentuk praktik pendidikan yang diajarkan pada periode <i>salaf al-shalih</i> ; (2) Menggunakan referensi literatur <i>salafi</i> dalam pelajaran Islam; (3) menjadikan <i>Tahfidz al-Qur'an</i> sebagai materi pokok.	
<b>Inklusif</b>	<b>Eksklusif</b>
Memperkenalkan keragaman Indonesia;	Fokus pada kelompok sendiri;
Bersedia bergaul dengan pemeluk agama selain Islam.	Tidak bergaul dengan pemeluk agama selain Islam.
Sebagian memiliki siswa non-Muslim;	Tidak menerima siswa non-Muslim;
Menerapkan kurikulum nasional (termasuk Pancasila, PKN, dan Bahasa Indonesia).	Menerapkan kurikulum sendiri, sedangkan kurikulum nasional hanya untuk ujian penyetaraan (termasuk Pancasila, PKN, dan Bahasa Indonesia).
Menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain; tetapi bisa menerima jika ada yang melakukan.	Menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain; dan secara mutlak menolaknya.

Secara rinci, HS dengan tipologinya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut—yang masing-masing masih dikelompokkan menurut asal demografis.

### HS Surabaya

No.	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Thayyibah	Agama – Islam Eksklusif	HS Komunitas ini menganggap agama lain sebagai saingan Islam. Peserta HS hanya Muslim dan tidak berinteraksi dengan agama lain. Tidak boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain. Tidak ada upacara bendera. PKN tidak diajarkan. Tokoh nasional yang diajarkan hanya tokoh dari Islam.
2.	HS Bunga Mawar	Non-agama	HS Majemuk. Menerapkan kurikulum nasional. Peserta beragam dari latar belakang ekonomi, sosial, dan agama. Biasa mengucapkan selamat hari besar agama lain. Sebagian besar peserta adalah Droup Out dari sekolah formal.
3.	HS PKBM Primagama Pakuwon	Non-agama	HS Komunitas dengan peserta yang beragam dan mengajarkan keragaman Indonesia. Kurikulum nasional yang diadaptasi dalam modul. Peserta adalah anak usia sekolah yang orang tuanya memilih HS sebagai model belajar. Substansi pengajaran pragmatis, karena output based, yakni lulus UN dengan nilai memuaskan.
4.	HS Insan Mulia	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Majemuk hanya mengajarkan agama Islam. Mengajarkan agama yang sudah dibuat bahan ajarnya oleh alumni Sunan Ampel Prodi Tafsir Hadis dan itu termuat pada silabus mata pelajaran agama. Namun, siswa berasal dari beragam agama. Ada guru berjilbab, tetapi tidak bercadar. Kurikulum nasional. Bersedia mengucapkan selamat hari besar agama lain. Ada upacara bendera. Bergaul dengan agama lain.
5.	HS Duta Bangsa	Berbasis Islam Salafi-Inklusif	HS Majemuk khusus siswa Muslim. Hanya bergaul dengan sesama Muslim. Menolak mengucapkan selamat hari besar agama lain karena tidak perlu. Materi agama diambil dari banyak sumber, tidak terbatas pada madzhab tertentu. Sangat kuat di materi <i>tahfidz</i> al-Qur'an dan cenderung tekstual dalam memahami agama. PKN diajarkan dengan mengambil contoh-contoh Islam. Memperkenalkan agama lain yang diakui di Indonesia.

6.	HS Al-Khair	Berbasis Islam Salafi-Inklusif	HS Tunggal. Siswa hanya beragama Islam. Tidak mengajarkan agama lain. Meski para pengajar perempuannya bercadar, proses pembelajarannya tidak memisahkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Referensi utama adalah buku-buku salafi. HS diadakan di pesantren, tapi siswanya beragam dari mulai agama, profesi, latar belakang dan sebagainya.
7.	HS Unggul	Non-agama	HS Tunggal ini dikelola oleh satu keluarga yang tidak berbasis agama dan tidak menekankan pada simbol-simbol agama. Mata pelajaran yang diwajibkan negara hanya untuk kebutuhan kelulusan. Menekankan pada bakat anak didik.
8.	HS Azmi	Non-agama	HS Tunggal ini dikelola oleh satu keluarga di mana ibu sebagai tutor. HS ini tidak berbasis agama, dan tidak menekankan pada simbol-simbol agama. Capaian pendidikan hanya pada pelajaran sekolah. Mata pelajaran yang diwajibkan negara hanya untuk kepentingan kelulusan.
9.	HS Sinar Mulia Indonesia	Agama - Kristen	HS Komunitas ini menekankan pengajaran agama dengan basis ke-Kristenan. Mendidik anak tangguh dalam Kristus. Nasionalis. HS ini juga mengajarkan keragaman melalui kegiatan bersama.
10.	HS PKBM Pena Surabaya	Non-agama	HS Komunitas. Tidak mengambil porsi dominan dalam kurikulum. Kurikulum nasional dan disesuaikan bakat siswa. Bergaul dengan pemeluk agama lain. Mengajarkan kebaikan untuk siapapun.
<p>Non-agama = 5          Agama – Kristen = 1          Agama – Islam Salafi Inklusif = 3          Agama – Islam Salafi Eksklusif = 1</p>			

### HS Makassar

No.	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Mira	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal ini menekankan pada pembelajaran Tahfidz Al-Quran dan dasar ajaran Islam. Menggunakan metode montesori, tidak menggunakan kurikulum nasional. Meskipun HS ini tidak melaksanakan upacara bendera, tp HS ini bergaul dengan Homeschooling Muslim Nusantara (HSMN).
2.	HS Naya	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Tunggal ini menekankan kepada Tahfiz al-Qur'an. Hanya bersosialisasi dengan keluarganya. Tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Tidak mengucapkan hari raya agama lain. Menggunakan <i>personalized curriculum</i> . Framework-nya dari <i>fitrah based education by design thinking</i> dengan Tahfidz al-Qur'an sebagai pokok. Guru mengajarkan al-Qur'an secara tekstual.
3.	HS Ikhwan	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Komunitas dengan jaringan dari Malaysia, yaitu Global Ikhwan—yang merupakan reinkarnasi dari Darul Arqam. HS berasrama dengan kurikulum agama dan umum. Tidak bergaul dengan agama lain dan tidak mengucapkan selamat raya agama lain. Tetapi ikut terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan (tahlil). Kurikulum agama dari Global Ikhwan.
4.	HS Cendekia	Non-agama	HS Komunitas yang seperti sekolah umum, bedanya adalah sekolah ini tidak dibuat secara 'formal'. Menggunakan kurikulum nasional, bergaul dan bersedia mengucapkan selamat hari besar agama lain. Semua pelajaran diajarkan di sekolah ini termasuk tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak memiliki afiliasi agama.
5.	HS Kasih Bangsa	Agama - Kristen	HS Majemuk berbasis Kristen, tetapi memiliki siswa Muslim. Kurikulum nasional, terbuka pada kelompok agama lain, termasuk mengucapkan selamat hari besar. HS ini rata-rata adalah Anak Berkebutuhan Khusus.

6.	HS Primagama	Non-agama	HS Komunitas. Tidak memiliki perbedaan dengan kantor pusat dan cabang yang lain. peserta yang beragam dan mengajarkan keragaman Indonesia. Kurikulum nasional yang diadaptasi dalam modul. Peserta adalah anak usia sekolah yang orang tuanya memilih HS sebagai model belajar. Mengadakan perayaan hari besar negara. Memperkenalkan pahlawan nasional. Guru mengajarkan agama, etnis, suku dan lain-lain. Tidak segregasi laki-laki dan perempuan. Pengajaran tidak menekankan indoktrinasi.
Non-agama = 2 Agama - Kristen = 1 Agama - Islam Salafi Inklusif = 1 Agama - Islam Salafi Eksklusif = 2			

### HS Padang

No.	HS	Tipologi	Keterangan
1.	PKBM HS Markazul Qur'an	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Komunitas. Fokus pada al-Qur'an. Guru yakin bahwa menghafal al-Qur'an, maka yang lain akan mengikuti. Ada pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan kelas. Bergaul hanya dengan komunitasnya. Menolak mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, kurikulum nasional hanya untuk keperluan ujian nasional.
2.	HS Umat Mulia	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Majemuk, terdiri dari 10 keluarga, tidak memperkenalkan agama lain. Bergaul hanya sesama komunitasnya. Tidak ada upacara bendera. Tidak mengajarkan PKN. Tidak memperkenalkan agama lain. kurikulum mandiri sesuai visi dan misi keluarga. Melakukan HS dengan motivasi sekolah sendiri, bikin belajar sendiri, modul dan kurikulum sendiri untuk anak sendiri. Landasan yang dipergunakan adalah al-Qur'an. Tujuannya adalah menyelamatkan anak dari api neraka.

3.	HS Hana	Non-agama	Alasan mendasar HS Tunggal ini memilih Sekolahrumah karena ingin memberikan pendidikan yang <i>customized</i> bagi anaknya. Mengingat di sekolah umum semua anak disamakan, seragam. HS ini menggunakan metode yang variatif. Dalam pengajarannya, HS ini juga memperkenalkan keragaman agama.
4.	HS Ita	Berbasis Islam – Salafi Inklusif	HS Tunggal. Menitikberatkan pada pendidikan agama Islam (tahfiz), tapi ketiganya bergaul dengan non- Islam dalam satu group menulis dan diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan orang atau organisasi yang berbeda mazhab dalam Islam.
5.	PKBM HS Primagama	Non-agama	HS Komunitas. Tidak memiliki perbedaan dengan kantor pusat dan cabang yang lain. Peserta yang beragam dan mengajarkan keragaman Indonesia. Kurikulum nasional yang diadaptasi dalam modul. Peserta adalah anak usia sekolah yang orang tuanya memilih HS sebagai model belajar.
6.	PKBM Farila Ilmi	Non-agama	HS PKBM Komunitas ini fokus pada pendidikan non formal dan kesetaraan untuk anak-anak marjinal (pemulung, nelayan, dsb). Melayani anak-anak HS dengan sekolah di kelas maupun dengan bimbingan online. Menggunakan kurikulum diknas, mengajarkan kewarganegaraan dan memperkenalkan agama lain.
7.	HS Cokro	Non-agama	HS Tunggal ini memilih Sekolahrumah karena anaknya di bully. Sehingga HS ini fokus pada kenyamanan anak. Kurikulum menyesuaikan dengan keinginan dan minat anak. HS ini juga memperkenalkan agama lain dan bergaul dengan pemeluk agama lain. “Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Sama seperti konsep gereja. Gereja itu bukan berarti ruang saja. Tapi lebih ke bagaimana kita yakini tempat belajar dan tempat beribadah. Mesjid juga bisa di definisikan serupa dengan Gereja.”
Non-agama = 4 Agama - Islam Salafi Inklusif = 1 Agama - Islam Salafi Eksklusif = 2			

### HS Jakarta-Depok-Tangerang Selatan

No.	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Karunia Indah	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Manjemuk dengan inisiator keluarga Muslim pengikut Jamaah Tabligh (JT), kelompok salafi yang berpusat di India. Seluruh anggota keluarga perempuan mengenakan <i>niqab (cadar)</i> . Mengikuti pendapat <i>al-um madrasatul ula</i> . Kurikulum fokus pada hafalan hadis dan <i>tahfidz</i> al-Qur'an, materi JT, dan mengajarkan bahasa Urdu. Ingin mendapatkan ridha Allah semata.
2.	HS Pahlawan	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Majemuk dengan pola <i>boarding</i> . Pengikut salafi, dan mantan JI (Jemaah Islamiyah). Perempuan dengan <i>niqab</i> dan <i>cadar</i> . Fokus pada <i>tahfidz</i> al-Qur'an. Kurikulum nasional dipelajari untuk ujian penyetaraan saja. Upacara bendera diganti dengan training dakwah. Ekstrakurikuler: berkuda, memanah, dan berenang. Sekolah formal tidak sesuai dengan Islam.
3.	HS Ana	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Tunggal dengan keluarga pengikut Salafi. Terkesan tertutup. Tidak mengajarkan PKN. Fokus pada <i>muroja'ah/tahfidz</i> al-Qur'an. Menginduk pada PKBM/HS Generasi Juara.
4.	PKBM Bina Potensi Insan Mandiri	Non-agama	HS Komunitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Fokus pada minat dan bakat anak. Menggunakan kurikulum nasional dengan menurunkan standar. Mengajarkan life skill dengan tujuan agar bisa diterima di masyarakat. HS ini juga mengajarkan kewarganegaraan dan mengenalkan agama lain.
5.	Eagle Nest Homeschooling	Agama - Kristen	HS Komunitas berbasis-agama Kristen. Mendidik anak tangguh dalam Kristus. Hanya ada siswa Kristen. Nasionalis. Mengajarkan keragaman melalui kegiatan <i>playdate</i> . Adopsi kurikulum luar negeri dengan modifikasi.

6.	PKBM Bina Insan Mandiri (Masjid Terminal)	Non-agama	HS Komunitas dengan alasan sosial-ekonomi sebagai penghambat akses sekolah formal. Sekolah Master (Masjid Terminal) mengajarkan mata pelajaran umum dan agama. Tujuannya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan.
7.	HS Nada	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal dengan orang tua mengenakan hijab beraliran salafi. Fokus pada <i>tahfidz</i> al-Quran dan ajaran salafi. Ada bahasa asing (Mandarin)—secara online. Porsi pelajaran umum sedikit. Mengajarkan keragaman Indonesia, tetapi menolak mengucapkan selamat hari besar agama lain.
8.	HS Teladan	Non- agama	HS Majemuk yang fokus pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Siswa dari beragam agama dan bergaul bersama.
9.	HS Nana	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS ini secara tegas mengidentifikasi diri dengan salafi. Pendidikan harus menjadikan anak sebagai <i>maisah</i> (pencari nafkah) bagi keluarganya dan pribadinya. Menerapkan “kurtilas”, dengan menambahkan materi keislaman salafi—yang diyakini keluarga. HS Tunggal ini cukup terbuka dengan sesama dan beda agama, bahkan anaknya bergaul dengan non-muslim. HS ini juga mendirikan sebuah PKBM dan mendirikan Homeschooling Muslim Indonesia (HSMI).
10.	HS Radit	Non-agama	HS Tunggal ini termotivasi untuk HS karena Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Fokus pada pengembangan bakat dan minat. Tergabung dengan PKBM Generasi Juara. Terbuka dengan sesama dan beda kelompok agama. Menggunakan kurikulum pribadi dan kurikulum nasional hanya sebagai tambahan.
Non-agama = 4 Agama – Kristen = 1 Agama Islam Salafi Inklusif = 2 Berbasis Islam Salafi-eksklusif = 3			



### Bandung

No.	Nama dan Jenis HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Sari	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal, terdorong oleh catatan harian anak yang ingin memberikan mahkota kepada orang tuanya, berupa al-Qur'an. Fokus belajar al-Qur'an dan <i>tahfidz</i> al-Qur'an. Meskipun demikian, tetap bergaul dengan agama lain—karena tergabung dalam HS Pramuka. Belajar PKN melalui internalisasi nilai-nilai kehidupan.
2.	HS Ria	Non-Agama	HS Tunggal ini didorong kritik terhadap sekolah formal. Bersikap terbuka terhadap agama dan ras lain. Bergabung dengan HS Pramuka. Belajar PKN secara langsung dalam pengurusan surat-surat di kantor pemerintah. Menerapkan metode waldroft.
3.	HS Nadin	Agama - Kristen	HS Tunggal berbasis agama Katolik. Terbuka bergaul dengan agama lain melalui HS Pramuka dan HS Pewaris Bangsa. Kurikulum fokus pada bakat anak.
4.	HS Nia	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal yang dikola oleh satu tutor/ibu sebagai pengajar. Metode yang digunakan adalah konsep sekolah di rumah. HS ini menekankan pada kenyamanan belajar anak, mengembangkan bakat dan minat anak. Dalam kesehariannya tutor HS ini konsisten menggunakan cadar. Menekankan pada <i>tahfiz</i> al-Qur'an.
5.	HS Telaga	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Majemuk. Menekankan pengajaran agama dari sisi nilainya. Bersedia bergaul dengan pemeluk agama lain, dan tidak keberatan mengucapkan selamat hari besar agama lain. Mencari pendidikan yang ideal untuk anak Indonesia. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada tauhid dan sirah nabawiyah.
6.	HS Taman Sekar	Non-agama	HS Komunitas. Kritik terhadap sekolah formal yang membosankan. Agama tidak mengambil porsi dominan dalam kurikulum. Kurikulum nasional dan disesuaikan bakat siswa. Bergaul dengan pemeluk agama lain. Mengajarkan kebaikan untuk siapapun.

7.	HS Widya	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal yang menekankan pada pengajaran agama, dan mengutamakan simbol-simbol agama, namun cara pandang dan metode pengajarannya cukup terbuka. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada tauhid dan sirah nabawiyah.
8.	HS Pewaris Bangsa	Non-agama	HS Komunitas. Kurikulum nasional yang disesuaikan dengan bakat anak. Bergaul dengan pemeluk agama lain. Tidak keberatan untuk mengucapkan selamat hari besar agama lain.
9.	HS Belantara	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Majemuk ini khusus untuk kelompok Muslim yang termasuk dalam naungannya. Paham Islam yang diajarkan tekstual. Kurikulum yang ditekankan adalah <i>tahfiz</i> . Metode pembelajaran menekankan indoktrinasi.
10.	HS Tina	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal yang menekankan pada pengajaran agama. Kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum dari <i>Cambridge</i> dengan fokus pada tumbuh kembang anak. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada tauhid dan sirah nabawiyah.
11.	HS Bersama	Non-agama	HS Majemuk in menekankan pada aspek kehidupan universal yang bertumpu pada nilai-nilai keragaman, terutama agama. HS ini juga anggotanya berbaur bersama dengan kelompok yang berbeda.
12.	HS Gotong Royong	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Majemuk ini menekankan pendidikan agama khusus para HS kelompok muslim. Meskipun hanya berbasis pada Islam, tapi HS ini juga cukup berempati terhadap kelompok lain yang berbeda. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada tauhid dan sirah nabawiyah.

Non-agama = 4  
 Agama – Kristen = 1  
 Agama - Islam Salafi Inklusif = 6  
 Agama – Islam Salafi Eksklusif = 1

**Solo**

No.	HS	Kategori	Keterangan
1.	HS Kak Seto	Non-agama	HS Komunitas. Memperluas akses pendidikan dengan siswa beragam agama. Kurikulum nasional ditambah ekstrakurikuler, seperti Friday Class. Anggota Asahpena.
2.	Kuttab Ibn Abbas	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Komunitas. Mendidik kader ulama dengan Kurikulum Iman dan Kurikulum Quran. Adapun Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKN dikelompokkan dalam kurikulum <i>nafi'ah</i> . Laki-laki dan perempuan dipisahkan. Mulai pembelajaran dengan membaca ikrar "Allah tuhan kami ( <i>Allahu Robbuna</i> ), Muhammad Nabi kami ( <i>Muhammad Rasuluna</i> ), Islam agama Kami ( <i>Islam Dinuna</i> ), Alquran Kitab kami ( <i>Alquran Kitabi</i> ), disusul membaca dua kalimat syahadat, untuk memperkuat akidah Islam anak sejak usia dini.
3	HS Cahaya Rejeki	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Komunitas. HS ini memberikan akses pada yang memilih pendidikan nonformal. Menerapkan kurikulum nasional ditambah tahfidz al-Qur'an. Dan mengaku memiliki siswa non-Muslim.
4	HS Ar-Ridlo	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Komunitas. Bertujuan sebagai pemberdayaan warga dari aktifitas eks-lokalisasi Silir maupun pinggiran sejalan dengan dakwah/syiar Islam. Kurikulum mengacu pada Kurikulum nasional. Lebih memprioritaskan syari'at Islam.
5	Syifa	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Komunitas. Layanan HS bertujuan mengakomodir ABK dan anak yang kesulitan belajar di sekolah formal. Kurikulum nasional ditambah program <i>tahfidz</i> al-Quran.

6.	HS Anugerah	Non-agama	HS Tunggal. Bertujuan mendidik anak yang kesulitan belajar dan keinginannya mendorong anak memiliki bakat seperti menyanyi dan menulis. Mengajarkan anak untuk bergaul dengan anak-anak di lingkungan, kendati berbeda keyakinan agama. Saling tolong menolong dengan warga sekitar berbeda keyakinan. Anak diarahkan menyanyi lagu-lagu nasional dan lagu-lagu Jawa.
7.	HS Cahaya Setia	Non- agama	HS Tunggal. Menyesuaikan kecepatan belajar anak. Belajar sains. Kurikulum pembelajaran berpedoman pada filosofi Charlotte Masson. Pembelajaran keagamaan dilakukan dengan berorientasi praktik, bukan hafalan.
8.	HS Wangi Melati	Agama Islam Salafi-Inklusif	HS Tunggal. Berprinsip bahwa orangtua memiliki tanggungjawab lebih utama dalam mendidik anak. Anak mulai dengan <i>tahfidz</i> al-Qur'an. Pemahaman tinggi dan disiplin menjalankan ajaran agama menjadi bekal anak dalam menjalani kehidupannya. Bergaul dengan kelompok yang beragam.
Non-agama = 3 Agama - Islam Salafi Inklusif = 4 Agama - Islam Salafi Eksklusif = 1			

## Menakar Ketahanan dan Kerentanan *Homeschooling*

Pada 53 HS yang diteliti, HS kategori non-agama dan Islam Salafi-Inklusif, baik HS Majemuk maupun HS Komunitas, terdapat ketahanan diri dari peluang paparan ideologi-keagamaan radikal dan mengalami “spiral pengucilan diri” (*spiral of encapsulations*) karena memiliki saluran bagi siswa untuk bersosialisasi dengan komunitasnya. Sebagian malah mendorong siswanya memiliki *engagement* dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan komunitasnya. Akan tetapi, untuk HS Tunggal, apalagi yang tidak mendaftarkan diri kepada Dinas Pendidikan, dengan demikian artinya juga tidak menyerahkan dokumen pembelajaran yang dirancang untuk anaknya, memiliki kerentanan pada tingkat yang paling awal, untuk terpapar ideologi-keagamaan bersifat radikal.

Pada HS kategori Islam Salafi-Eksklusif, kerentanan bagi siswa untuk mengalami “spiral pengucilan diri” lebih besar karena saluran untuk memiliki *engagement* dengan komunitas rendah. Kerentanan itu akan bertambah besar jika parameter yang dipergunakan penelitian ini tidak ditemukan, yaitu (1) tidak mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) Tidak melakukan upacara bendera Merah-Putih; (3) Tidak mengenalkan pahlawan nasional; (4) Tidak

mengajarkan lagu-lagu nasional; dan (5) Tidak mengenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, lambang garuda, pahlawan nasional). Berdasarkan temuan di lapangan, ketahanan dan kerentanan dapat dilihat dari enam wilayah dengan masing-masing titik tekan:

## Solo

Pada konteks Surakarta, Aspek ketahanan tampak pada HS Non-Agama. Salah satu aspek yang ditekankan adalah sebagaimana yang disampaikan Anugerah, salah satu informan, mendorong spirit untuk bergaul dengan anak-anak seusianya, baik komunitas anak sehoobi atau anak-anak tetangga sekitar rumah. Dengan demikian, Anugerah merasa yakin bahwa kendati anaknya belajar secara *homeschooling* namun tetap mampu bergaul dengan yang lainnya. Bahkan tidak hanya itu, anaknya juga bergaul dengan anak-anak berbeda agama.

Diakui Anugerah, ia hidup di lingkungan dengan keyakinan agama berbeda-beda. Beberapa tetangga dekatnya beragama Katolik atau Protestan, bahkan ada yang memegang keyakinan Jawa (aliran kebatinan Jawa). Namun, Anugerah yang mengaku berlatarbelakang tradisi Tarekat Siddiqiyah Jombang ini merasa kehidupannya tetap berlangsung rukun bahkan saling bantu saat ada musibah meninggal dunia.

*“Kita bergaul berhubungan dengan tetangga biasa aja dan gak ada persoalan. Kalau sepengetahuan saya di sini karena saya juga belum lama tinggal disini, itu biasa aja tidak merasa terganggu. Bahkan temen Bangkit Jiwa juga yang belajar disini ada dua orang, yang non-Islam itu Katolik. Kalau lingkungan sini itu rukun. Kalau misalnya ada yang meninggalnya orang Kristen itu yang bantuannya semuanya, termasuk orang Islam. Begitu juga kalau orang Islam meninggal, yang jenguk dan yang bantu juga orang Kristen. Kalau disini seperti itu. Saya itu punya prinsip tidak fanatik, saya orangnya bisa menerima perbedaan gitu yah.”*

Sementara HS yang memiliki kerentanan dalam konteks Surakarta adalah PKBM seperti PKBM Kuttab Ibnu Abbas. PKBM ini dikelola oleh Yayasan Hamalatu al-Quran dengan Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Muhammad Mu’idinillah dan Ketua Aminuddin Hidayat ST. PKBM Kuttab Ibnu Abbas memiliki visi “Mencetak Generasi Qurani Ulul Albab yang Berakhlak Mulia”. Selanjutnya, misinya adalah 1) membangun karakter imani dalam hal aqidah, ibadah, dan muamalah, 2) Membentuk generasi Qurani Ulul Albab dalam Ilmu dan Amal, 3) Membentuk Kepribadian yang Mandiri, peduli, dan bertanggungjawab.

Dari sisi kurikulum, leaflet PKBM Kuttab Ibnu Abbas menyebutkan jika kurikulumnya memadukan antara Materi Iman, Materi Quran, dan Ulumunnafi’ah. Materi pertama, memuat penanaman nilai-nilai tauhid dari Quran dan Sunnah, menanamkan dan membiasakan akhlakul karimah, memahami Alquran melalui tafsir, assunnah (hadits), dan bahasa Arab; sirah nabawiyah, shahabat dan tabiin. Materi kedua memuat pelajaran iqro, kitabah, tahsin, dan tafsir

Alquran; dan tadabbur alQuran. Sedangkan materi ketiga memuat baca tulis Arab dan latin, sains (biologi, matematika, dan bahasa Inggris), pelajaran-pelajaran lain sesuai kebutuhan dan minat anak.

Pada kadar tertentu, sisi kerentanan tampak pada aspek pendidikan kebangsaan. Berdasarkan observasi, di ruang-ruang guru dan kelas PKBM Kuttab Ibnu Abbas tidak tersedia simbol-simbol negara seperti Bendera Merah Putih, Burung Garuda, dan Foto Presiden/Wakil Presiden. Selain itu, hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus tidak melaksanakan, Ustadz Danang, salah satu informan, mengaku bahwa PKBM Kuttab Ibnu Abbas tidak melaksanakan hari peringatan kemerdekaan "*Kalau kita non-formal. Kita bisa tidak mengadakan itu. Kecuali formal. Waktunya juga enggak cukup.*"

## Surabaya

Di Surabaya, HS PKBM menjadi barometer HS yang memiliki ketahanan terhadap radikalisme dan ekstremisme. PKBM ini diprakarasi oleh H. SH pada tahun 1990-an. HS PKBM ini bisa dikatakan sangat inklusif, meski setelah tahun 2000-an akhirnya pindah lokasi ke sebuah gang perumahan penduduk dan menumpang di sebuah pondok pesantren. Jadi, meski ada di dalam kompleks pondok, mereka tetap menerima peserta dari luar dengan latar belakang yang beragam.

*"Proses pembelajaran di sini fokus pada pelajaran paket saja. Tidak lebih. Apalagi sejak pindah ke pondok ini... (pelajaran) agama menjadi tidak diajarkan di PKBM karena kebanyakan anak-anaknya adalah santri. Adapun mereka yang di luar santri, kami tidak menuntut apa-apa" (SR, HS-Att)*

Selain itu, dari sisi kurikulum PKBM ini fokus pada beberapa variabel pengajaran yang saat ini sedang tren di masyarakat: tahfidz, dan hampir seluruh konten pelajaran dengan muatan Islam. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa PKBM ini mengajarkan pelajaran lain seperti PPKN, Bahasa Indonesia, dan yang lainnya, mereka mengajarkan pelajaran itu sesuai dengan arahan dan ketentuan dinas. Hal terakhir ini merupakan salah satu aspek yang memiliki daya lenting HS terhadap paham intoleran karena paling tidak mengajarkan wawasan kebangsaan.

Kendati demikian, di balik variabel yang membuat lembaga ini mengalami daya lenting yang kuat, ternyata beberapa aspek lain yang muncul bersamaan dengan ketahanan itu adalah kerentanan. Sebenarnya, pada konteks Surabaya, kedua hal itu bisa saling berposisi secara seimbang jika aspek-aspek dari masing-masing entitas memiliki kekuatan yang seimbang. Tetapi kalau salah satunya pincang, maka bisa sangat mengkhawatirkan. Kerentanan, dalam konteks Surabaya, adalah tersedianya beragam peluang yang bisa diisi oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Dalam konteks Surabaya, terdapat beberapa hal yang menyebabkan HS rentan. *Pertama*, HS dihasilkan dari kritik terhadap sistem pendidikan mapan. Kritik itu muncul karena terdapat

kelemahan dari sistem pendidikan yang disiapkan pemerintah selama ini, hal ini juga merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh para pihak tertentu untuk menghancurkan kemapanan yang sudah ada. *Kedua*, proses optimalisasi sistem pembelajaran dengan konten lokal yang tidak tuntas, menyebabkan HS menjamur dengan keragamannya sendiri. Konten lokal adalah energi yang bisa memenuhi kekuatan entitas masyarakat; *Ketiga*, akibat dari kedua hal di atas, beberapa pihak kemudian melakukan upaya-upaya sistematis untuk memperkecil porsi negara dalam proses penanaman ideologi kebangsaan dan keindonesiaan.

*Keempat*, beberapa HS hanya fokus kepada masalah akademik peserta sementara isu-isu dan materi kenegaraan terabaikan karena sistemnya tersekat pada target akademik, bukan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. *Kelima*, beberapa HS fokus kepada ideology dari masing-masing HS yang disusupkan pada sistem pembelajaran mereka secara sistematis.

## Jadetangsel

Sementra itu, pada kasus Jadetangsel, HS yang memiliki kerentanan adalah HS Karunia Indah yang menginduk pada PKBM Bina Insan Kamil. Secara teknis, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional dengan menggunakan K-13. Buku-buku umum seperti Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, IPA, IPS tampaknya tersedia di rak buku sebagai referensi utama. Namun, dalam proses KBM, materi umum ini tidak diajarkan kepada peserta didik.

Hal menarik dari HS Karunia ini adalah kurikulum utama menggunakan buku-buku keagamaan yang terjemahan dari India (baca: Jamaah Tabligh) yaitu buku *Deeniyat* yang memuat materi Al-Quran, hadits, fiqih, Sejarah Peradaban Islam dan Bahasa Arab. Selain itu, ada buku tentang “40 hadits & 8 adab sunnah sehari-hari” yang dibuat oleh HS Karunia Indah.

Perlu dicatat, HS Karunia Indah ini merupakan wadah perjuangan bagi kelompok Jamaah Tabligh, sehingga acap kali digunakan untuk melakukan *masthurah* dan *khuruj* di luar negeri. Naira, salah satu informan, menceritakan bagaimana kegiatan *masthuroh* di Brunai Darussalam yang ia jalani.

*“Iya, kami baru saja ini sampai dari Brunei Darussalam kegiatan Masthurah. Kegiatan Masthurah itu harus didampingi oleh Mahrom hakiki yaitu ibu, anak, suami dan ayah. Jadwal masthurah itu dilakukan per 3 bulan, selama 3 hari. Satu tahun 10-15 hari per tahun, kalau ada waktu dan ada uangnya bisa dilakukan selama 2 bulan. ...Kegiatan masthurah itu adalah dakwah dengan tujuan mengembalikan wanita pada rumah, bukan untuk mengeluarkan dari rumah. Jadi, kita masthurah di luar yang kemudian kita mengamalkannya di rumah..”*

Hal tersebut menandakan adanya eksklusivitas di HS Karunia. Hal yang menarik adalah berdasarkan observasi, ruang belajar HS terpampang besar poster “markazul Islam” namun sama sekali tidak ada simbol-simbol kenegaraan seperti foto presiden, wakil presiden maupun pahlawan nasional. Selain itu, pada saat KBM, Nurul, salah satu siswa, mengaku tidak pernah diajarkan lagu Indonesia Raya. Lebih jauh, Nurul mengaku, meski acap kali bergaul dengan

teman non-Muslim, namun ketika dihadiahi makanan, ia harus memeriksa dahulu kehalalannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang kecurigaan dalam pergaulan.

## Makassar

Di Makassar, HS memiliki kerentanan tampak pada eksklusivitas yang ditekankan pada peserta didik sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi dengan yang lain. Mereka hanya bersosialisasi dengan yang satu komunitas saja. Selain dari pada itu, mereka lebih menjaga jarak dengan kelompok yang berbeda.

Regulasi dalam pelaksanaan *homeschooling* di Makassar hanya menggunakan Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Tidak ada regulasi tingkat daerah baik tingkat provinsi atau peraturan gubernur maupun peraturan tingkat kota/kabupaten atau peraturan walikota dan bupati yang mengatur tentang *homeschooling* di Makassar.

Maka, ketika dikonfirmasi tentang kerentanan masuknya paham-paham radikalisme pada *homeschooling*, Yasmain, salah satu informan, mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh longgarnya regulasi tentang *homeschooling*. "Regulasi *homeschooling* dan PKBM seakan timpang tindih,"

## Bandung

Kota Bandung merupakan anti tesis dari Makassar, aspek regulasi merupakan hal penting dalam melihat ketahanan dan kerentanan HS. Di Kota Bandung, ketahanan yang kuat terhadap perkembangan HS Islam radikal dapat dilihat dari beragam faktor di antaranya:

- a. Intervensi pemerintah yang cukup kuat dalam pengembangan HS. Hal ini diindikasikan dengan adanya kebijakan-kebijakan maupun program-program untuk pengembangan HS. Ada dua kebijakan yang ditengarai memiliki kaitan erat dengan aturan HS yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2008, yang salah satu pasalnya menjelaskan peluang bagi siswa HS dalam jalur infomal untuk pindah ke sekolah formal atau non-formal setelah "mendapat pengakuan dari Lembaga yang ditetapkan Pemdakot". Hasil pendidikan informal juga diakui setara dengan pendidikan formal, sebagaimana tertera dalam bab III bagian keempat yaitu bahwa "hasil pendidikan informal dapat diakui setelah dilakukan pengujian oleh Lembaga yang ditetapkan oleh Pemkot" dan pasal lainnya yang menyebutkan bahwa "Hasil pendidikan non-formal dihargai/diberikan pengakuan kompetensi setelah lulus uji kompetensi oleh Lembaga pengujian yang ditetapkan oleh Pemda Kota". Peraturan tersebut menjamin bahwa anak-anak HS bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengalaman menunjukkan ada mahasiswa ITB yang diterima dari jalur HS.

Intervensi pemerintah terhadap HS di Kota Bandung juga makin diperkuat oleh ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 tentang tata cara pengujian,



pindah jalur pendidikan, dan pengakuan hasil belajar bagi peserta didik di jalur formal dan informal.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan HS. Tercatat hampir 10 kegiatan yang disponsori Disdik Bandung di sekitar tahun 2016, mulai dari penyelenggaraan kompetisi keilmuan sampai dengan penyusunan model penyelenggaraan HS dan sosialisasi oleh para penilik terhadap PKBM-PKBM yang mengampu anak-anak HS. Dalam kegiatan-kegiatan yang digagas oleh Disdik Kota Bandung tersebut suasana keterbukaan antara HS dari beragam agama, ras dan suku sangat cair.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, relasi antar umat beragama di komunitas Pramuka. Setiap orang dengan karakter dan pemahaman ideloginya yang berbeda bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan akrab tanpa sekat. Bahkan pada saat observasi ke HS Pramuka di Taman Lansia, menemukan beberapa perempuan Muslim yang berhijab dan bercadar sedang bercakap-cakap dengan orang tua HS lainnya yang beretnis Cina. Dita, salah seorang Kordinator HS Pramuka yang menggunakan hijab yang cukup panjang bisa bergaul dan melebur dengan orang tua dari HS lainnya dengan baik bahkan dengan mereka yang berpakaian terbuka.

- b. Kedekatan pejabat pemerintah dengan tokoh-tokoh HS yang cukup populer di Bandung menjadi faktor tersendiri dalam mencegah berkembangnya radikalisme agama di HS. Sejak masa Dr Elih Sudyapermana diangkat menjadi Kepala Dinas Kota Bandung, banyak keluarga-keluarga HS yang merasa mendapatkan dukungan yang memadai dari Pemerintah Kota. Pejabat di Dikdis Kota Bandung mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan para pendiri HS terutama yang komunitas dan majemuk.
- c. Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan prestasi penilik sekolah pada masa Kepala Dinasnya Elih Permana, juga berkontribusi bagi adanya ketahanan untuk meminimalisir berkembangnya HS radikal. Salah satu tupoksi Penilik adalah melakukan pengawasan pada pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Alhasil, sekarang ini, jabatan penilik sekolah yang dulu dianggap sebagai *the second class* kini berubah menjadi rebutan karena kini gaji penilik sekolah mencapai 13 jutaan lebih besar dari pengawas Pada beragam kesempatan, Elih selalu menekankan toleransi dan pentingnya respek pada perbedaan. Pada saat pemberian penghargaan kepada Insan yang berjasa untuk kemajuan Pendidikan di Kota Bandung, termasuk pelaku HS, Elih berpesan tentang pentingnya siswa dididik agar bisa menjadi penerus bangsa yang dapat membawa keragaman menjadi keserasian yang pada akhirnya membawa harmoni bagi bangsa Indonesia.
- d. Interaksi dan komunikasi yang intensif baik melalui media sosial maupun *face to face* antar pelaku HS di Kota Bandung yang jumlahnya terus meningkat. Pertemuan yang bersifat regular ini menjadi bola yang menghancurkan kristal-kristal radikalisme sehingga HS dari beragam latar belakang dan kecenderungan ideologis ini lebur dalam satu aktivitas bersama dan saling mendukung. Maraknya HS di Kota Bandung dengan

jejaring mereka yang kuat menyebabkan sulit menemukan HS yang benar-benar eksklusif atau menutup diri dari kelompok lainnya. Sanny Darmawan, pelaku HS tertua di Kota Bandung, menuturkan pendapatnya.

*“Akan sangat sulit mengelola HS tunggal jika hanya oleh dirinya sendiri dan keluarganya, anak-anak juga tetap perlu tumbuh, mereka juga punya keinginan bersosialisasi, bermain dengan anak seusianya, sehingga tidak bisa orang tua yang mengelola HS hanya berfokus pada dirinya sendiri.”*

Sementara itu, di Bandung, HS Salafi eksklusif sangat rentan menjadi sarana untuk berkembangnya HS radikal, karena pada umumnya mereka menutup diri dan enggan bergaul dengan non-Muslim. Terkait HS, kerentanan HS umumnya terjadi pada HS Salafi Eksklusif, yang pada umumnya bersikap tertutup terhadap orang di luar kelompoknya, intoleran dan memiliki keyakinan berdirinya negara Islam. Pada kasus di Bandung tidak mudah untuk menemukan Salafi Eksklusif karena mereka pada umumnya tertutup. Sikap tertutup HS Salafi eksklusif diakui oleh salah seorang informan dalam penelitian ini:

*Kalo yang radikal kan, mereka kan gak terbuka buat kelompok lain, di wawancarai kaya gini gak akan mau kali bu. Kalo di Bandung sih kata saya sih belum nemu tuh bu yang radikal, lebih cenderung yang toleran. Maksudnya homescholling juga lebih mempermudah lah buat kita juga, karena memang banyak hal yang mungkin tidak sesuai dari sekolah, dibandingin ngerubah sekolah kita gak bisa bu (Wiwid, 15 Agustus 2016)*

Dita juga mengakui sikap tertutup dari kelompok HS Salafi eksklusif dan pada umumnya mereka adalah HS Tunggal. Dita menuturkan pengalamannya dalam wawancara informal, *“beberapa calon anggota HS Pramuka yang muslim pernah datang dan mau gabung dengan kami, tapi setelah mereka melihat kegiatan kami yang diikuti oleh anak-anak HS dari beragam agama terus mereka gak pernah datang lagi”*.

Sikap tertutup itu juga diajarkan orang tua HS kepada anak-anak mereka. Shahra Ramadhani, siswi HS yang pada saat diwawancara baru sekitar dua bulan menjalani HS menceritakan bahwa dia perlu mendapatkan restu dan izin dari kedua orang tuanya yang mengkhawatirkan keimanannya karena bergaul bersama dengan non muslim. Shahra adalah anak dari keluarga yang disebutkan sangat kuat beragama.

## **Padang**

Pada kasus Padang, Homeschooling Tunggal merupakan HS yang memiliki ketahanan terhadap eksklusivisme. HS Tunggal berusaha mendidik anak-anaknya untuk terbuka pada keragaman etnis maupun agama. Hana dan Adit, misalnya sering membawa anak mereka ke kampung

budaya yang berlokasi tidak jauh dari rumah mereka. Begitu juga dengan Cokro dan Nita yang terbuka memperkenalkan dan menjelaskan perbedaan agama dan etnis di Indonesia kepada anak mereka. Hana menekankan aspek kritis dan objektif dalam melihat masalah, ia menjelaskan menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa di negara manapun pasti ada orang yang gak bagus. Seperti di film, ada Cina yang tidak bagus tetapi ada yang seperti kungfu Panda yang bagus. Pendidikan cinta tanah air dan rasa nasionalisme juga ditanamkan pada homeschooling tunggal ini. Hana juga mengajari anaknya untuk menghafal lagu Indonesia Raya. Untuk wawasan kebangsaan, menurutnya banyak sekali yang bisa disampaikan ketika melakukan perjalanan.

Sementara itu, HS Umat Mulia dan PKBM HS Markazul Qur'an merupakan HS yang memiliki kerentanan karena tidak membuka diri untuk berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim. Berdasarkan pengakuan informan ketika ditanya tentang toleransi,

*"Jadi toleransi itu seperti tasamuh beragama, misalkan kita bergaul sesama manusia, bersosial, kalau misal beda agama misalnya, dia agama dia kita agama kita, lakum diinukum waliyadin. Kalau anak-anak di sini belum pernah praktek. Soalnya saya belum pernah menemukan orang itu yang selain agama Islam. Karena itu, untuk tasamuh itu sendiri, toleransi beragama, sosial, itu belum sampai pelajarannya,"*

## GENDER

Penelitian ini menekankan pada aspek penguatan gender. Informan dalam penelitian ini mayoritas perempuan sebagai pelaku HS. Total informan dalam penelitian ini 129 informan dengan komposisi 85 perempuan (66%) dan 44 laki-laki (34%). Selain itu, dalam desain, instrument, pemilihan informan dan observasi, menekankan pada aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Wacana kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan hingga saat ini masih sangat tinggi baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan lain-lain meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengharuskan semua Kementrian dan Lembaga negara untuk membuat program yang dapat meminimalisir kesenjangan tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menuangkan kebijakan PUG dalam beragam RPJM termasuk RPJM tahun 2019-2024 untuk menjamin terimplementasinya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat.

Namun, dalam penelitian ini faktanya menunjukkan bahwa kehadiran HS justru memperkuat kesenjangan gender. Para pelaku HS cenderung melembagakan system Patriarchy yang menekankan pada *divisin of labor* serta pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Mansur Fakih (1997) menyebutkan ada lima bentuk ketidakadilan gender yaitu subordinasi, marginalisasi, stereotype, double burden dan kekerasan. Kelima bentuk ketidakadilan gender ini dapat digunakan sebagai analysis untuk melihat adanya kesenjangan gender di HS. Pada sisi marginalisasi, penelitian ini, seperti pada kasus di Kota Bandung, menemukan beberapa perempuan orang tua siswa HS baik yang tunggal maupun majemuk mengaku berhenti

bekerja karena fokus untuk mendidik anak di rumah. Dita misalnya berhenti setelah 13 tahun berkarir sebagai dosen karena harus mendidik anak-anaknya di HS. Dita mengaku awalnya mendidik sendiri ketiga anaknya di HS, namun sekarang suaminya mulai terlibat. Pengalaman Dita menunjukkan bahwa perempuan termarginalisasikan secara ekonomi. Dita yang semula memiliki kemandirian ekonomi kini tergantung secara ekonomi pada suaminya.

Selain itu, sebagian besar pelaku HS dalam penelitian ini masih memelihara pola pembagian kerja konvensional yang menekankan pada dikotomi dalam pembagian kerja di rumah tangga. Peran suami pada sisi strategis seperti menentukan visi keluarga, menentukan arah pendidikan anak, evaluasi terhadap keberhasilan anak, dan pencari nafkah. Sementara itu, peran istri dalam bidang teknis mengelola rumah tangga termasuk menjadi guru bagi anak HS.

*Ya jadi, kalau suami itu yang menentukan visi keluarga. Jadi memang peran dia bukan diuruskan teknis, tapi di urusan visi misinya. Jadi pembangunan karakter itu tentu dari suami. Permasalahan yang ada itu dibicarakan, ya cara penanganannya itu baru kita lakukan. Dan biasanya suami lebih banyak memberikan solusi penanganannya seperti apa, jadi untuk terjun teknisnya enggak. Itu dipercayakan lah... pembentukan karakter bu kalau sekarang, penentu arah, ini anak jurusan apa, jadi suami nanti evaluasi kemampuan anaknya. Walaupun yang dua itu tidak homeschooling, tapi tetep nanti penentu arahnya itu adalah suami yang mengevaluasi anak (Nurhasanah, 14 Agustus 2019).*

Selain itu, ketimpangan gender nampak dalam bertambahnya beban kerja bagi istri di rumah. Tanggung jawab istri tidak hanya mengurus pekerjaan rumah tetapi juga menjadi guru bagi anak-anaknya. Peran istri menjadi semakin besar dan tidak jarang menimbulkan stress sebagaimana dialami para pelaku HS di Bandung. Sani mengalami stress ketika anaknya yang mogok sekolah dan memilih HS, namun kemudian hanya menghabiskan waktunya dengan main game selama satu tahun. Istri pada umumnya stress ketika pertama kali memilih HS untuk anak-anak mereka, karena bingung untuk menentukan kurikulum dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, sebagaimana diakui Nurhasanah. Stress istri makin bertambah ketika anak-anak mereka yang HS menghadapi ujian nasional (UN).

Sementara itu, dalam konteks Sumatera Barat, pendidikan tentang peran gender dan pemberian kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam mengakses fasilitas pendidikan, berekspresi atau mengeluarkan pendapat serta berprestasi ditanamkan pada sebagian besar *Homeschooling* di tiga wilayah Sumatra Barat. Pembagian peran antara ayah dan ibu yang menjalani *Homeschooling* dalam membantu anak-anaknya dalam belajar, terlihat cukup seimbang.

Namun, ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik perempuan di beberapa *Homeschooling* yang peneliti temui. Hal ini terkait dengan pandangan keagamaan lembaga *Homeschooling* itu sendiri, maupun pandangan keagamaan pribadi peserta didik itu sendiri. Seperti yang diungkapkan salah satu informan, M.

*“Untuk sekarang kita belum bisa memisahkan para siswa perempuan dan laki-laki karena inilah realitas sekarang. Kita tapi menggunakan hijab/partisi karena pubertas itu susah ya bu, ya. Pasti mereka kan ada jalannya. Jadi ada hijab, batas antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.”*

## KESIMPULAN

*Homeschooling* (HS) menjadi metode pembelajaran yang semakin diminati oleh masyarakat perkotaan di Indonesia karena bersifat fleksibel dan bisa didesain sesuai dengan bakat dan minat siswa. Namun demikian, regulasi negara yang hanya dapat menjangkau *homeschooling* berbasis komunitas namun belum dapat menjangkau *homeschooling* tunggal dan majemuk, membuat HS menjadi “tanah tak bertuan” yang rentan bagi berlangsungnya proses transmisi dan kultivasi nilai-nilai keagamaan yang sempit dan radikal.

*Homeschooling* memiliki potensi sebagai sarana pembentukan “spiral pengucilan diri” (*spiral of encapsulations*) yang semakin menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (*common values*) lain yang membuka cakrawala berpikirnya. *Homeschooling* menjadi alat kendali bagi kelompok ekstremisme kekerasan dengan membentuk spiral pengucilan diri melalui narasi eksklusivisme identitas dan nilai-nilai keagamaan yang menegaskan legitimasi sistem yang ada serta menolak menerima perbedaan dan keragaman. Namun hal ini masih dapat dilawan oleh sebagian besar praktisi yang *homeschooling* berbasis agama tetapi inklusif maupun yang berbasis non-agama, di mana promosi nilai-nilai kebangsaan, kohesi sosial dan penghormatan pada perbedaan dan keragaman menjadi prioritas. Regulasi yang implementatif dan komprehensif, karenanya, diperlukan untuk mengawal dan membina berbagai varian *homeschooling* di Indonesia.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat sipil. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan para pemangku kebijakan dapat memformulasikan kebijakan yang tepat dan relevan dalam meningkatkan kualitas *homeschooling*, menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta menghormati keragaman dan perbedaan. Penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah, pemangku kebijakan, asosiasi penyelenggara *homeschooling*, serta masyarakat umum di Indonesia:

### Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Permendikbud Nomor 129/2014, terutama tugas pokok dan fungsi dinas terkait dengan pembinaan dan pengawasan *homeschooling* di wilayah tingkat kota.
2. Membentuk struktur khusus di pusat dan dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dengan mandat monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh HS Komunitas (termasuk perijinan, kurikulum, pendidik, sarana prasarana, dan lingkungan)

3. Mempermudah mekanisme pendaftaran HS tunggal dan HS majemuk dengan menggunakan *one-single online submission* oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga pihak pemerintah memiliki database yang komprehensif.
4. Merumuskan sistem penjaminan mutu pelaksanaan UNPK dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
5. Bekerja sama dengan dinas pendidikan tingkat kota memperkuat pendidikan sebagai alat untuk moderasi beragama, melalui pengembangan kurikulum dan pelatihan tutor *homeschooling*.
6. Menyediakan fasilitas bagi siswa-siswa HS bersosialisasi untuk mengenal, bergaul serta berinteraksi dengan kelompok dari berbagai latar belakang untuk menyemaikan nilai toleransi dan kebangsaan.

### **Kementerian dalam Negeri**

1. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi kepada kepala daerah tingkat kabupaten/kota terkait dengan pembinaan dan pengawasan keluarga praktisi *homeschooling* oleh Dinas Pendidikan tingkat kota.
2. Bekerjasama dengan kepala daerah, DPRD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menyusun peraturan daerah serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga praktisi *homeschooling* untuk menjunjung tinggi identitas nasional, menghargai keragaman dan perbedaan, serta melakukan interaksi sosial secara inklusif.

### **Asosiasi Penyelenggara Homeschooling**

1. Mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang menghargai keragaman dan perbedaan latar belakang etnis, agama dan status sosial melalui pengembangan kurikulum yang inklusif.
2. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di tingkat kota, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas keluarga-keluarga praktisi *homeschooling* terkait dengan mutu dan isi pembelajaran yang menekankan pada identitas nasional, inklusivitas, toleransi dan moderasi beragama.

### **Keluarga Praktisi Homeschooling**

1. Mendorong anak-anak *homeschooling* untuk berpikir kritis, memiliki nasionalisme, memiliki rasa empati dan menghormati keragaman dan perbedaan.
2. Membuka wawasan anak-anak *homeschooling* dengan mengunjungi rumah-rumah ibadah, serta mempelajari seni, makanan, dan budaya dengan mengundang ataupun mengunjungi orang-orang yang berbeda latar belakang dengan keluarga praktisi *homeschooling* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Ashour, Omar. *The Deradicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements*. New York, London: Routledge, 2009
- Basham, Patrick, John Merrifield, and Claudia R. Hepburn. 2007. *Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream*. 2<sup>nd</sup> Edition. A Fraser Institute Occasional Paper, October 2007.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terj. Achmad F. & Raianayati KP. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Della Porta, Donatella. 1995. *Social Movement, Political Violence, and the State: A Contemporary Analysis of Italy and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Denzin, Norman K. and Yvobna S. Lincoln, 2007. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk, 2009. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hafez, M., & Mullins, C. (2015). The radicalization puzzle: a theoretical synthesis of empirical approaches to homegrown extremism. *Studies in Conflict & Terrorism*.
- J. M. Asmani. 2012. *A Closer Look at Home Schooling, Making it more Comfortable and Learning Activities*. Jakarta: Flash Book.
- Jamshed, Shazia. 2014. "Qualitative research method-interviewing and observation". *J Basic Clin Pharm*. September 2014-November 2014; 5(4): 87-88. doi: 10.4103/0976-0105.141942. PMID: PMC4194943.
- Kembara, M. 2007. *Complete Guide Homeshooling*. Bandung: Progressio (Grup Syamil).
- Kunzman, Robert. 2010. "Homeschooling and Religious Fundamentalism". *International Electronic Journal of Elementary Education*, Vol. 3, Issue 1, October, 18—29.
- Loy Kho. 2007. *Homeschooling untuk Anak, Mengapa Tidak?*. Yogyakarta: Kanisius.
- M. Magdalena. 2010. *My Son Didn't Want To School, Don't Be Afraid To Try Homeschooling*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Maryono. 2013. "Islamic Homeschooling Upaya Membangun Karakter Islami (Studi Kasus di Islamic Homeschooling Fatanugraha Wonosobo)". *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Vol. 11 No. 1 Juni 2013, h. 41-56.
- Mulyadi, Seto. 2007. *Homeschooling Keluarga Kak Seto: Mudah, Murah, Meriah, dan Direstui Pemerintah*. Jakarta: Mizan Kaifa.
- Myers, Martin and Kalwant Bhopal. 2018. "Muslims, Home Education and

Risk in British Society". *British Journal of Sociology of Education*, 39:2, 212-226, DOI: 10.1080/01425692.2017.1406337.

N. A. Wiyani. 2012. "Save Our Children from School Bullying," Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2012.

Reich, R. 2005. "Why Homeschooling Should be Regulated." In *Home Schooling in Full View*, edited by B. S. Cooper, 109-120. Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Saputro, Ichsan Wibowo. 2017. *Ideologi Pendidikan Islam di Homeschooling: Kajian Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implikasinya di Homeschooling Group Khoiru Ummah*. Tesis Magister Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Setyowati, H. 2010. "Homeschooling, Creating the Best of Me," Jkt. Kompas Gramedia.

Shives, Steve. 2008. "Homeschoolers Who Don't Learn Science Shouldn't Receive a Diploma," *American Chronicle*, April 8, 2008. Copyright © 2008 Ultio LLC. Reproduced by permission of the author.

Sullivan, John L., James E. Piereson, and George E. Marcus. 1982. *Political Tolerance and American Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.

Sumardino. 2014. *Apa Itu Homeschooling*. Jakarta: PandaMedia.

Syafruddin, Didin dan Ismatu Ropi (ed), *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, PPIM UIN Jakarta, 2018

Wahid, Din. 2014. *Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia*. Disertasi di Universitas Leiden Belanda.

"Mengaku Homeschooling, Anak Bomber Surabaya Hanya Terima Doktrin Orang tua", <https://www.liputan6.com/>, Selasa, 15 Mei 2018. "Anak Pelaku Bom Teror Surabaya tak Belajar di Sekolah Umum" <https://nasional.republika.co.id/>, Selasa, 15 Mei 2018.

"Muslims, Home Education and Risk in British Society". *British Journal of Sociology of Education*, 39:2, 212-226, DOI: 10.1080/01425692.2017.1406337.

## Laporan Penelitian

Tati Rohayati & Rini Apriantini, *Tanah Tak Terawat: Menakar Ketahanan dan Kerentanan pada Homeschooling di Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan*, Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2019

Tantan Hermansah, *Kontestasi dan Pragmatisme: Dinamika Eksistensi Sekolahrumah (Homeschooling) di Kota Surabaya*, Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2019

Zaenal Muttaqin dan Mukti Ali, *Homeschooling; Berebut Pengaruh di Lahan Terlantar*, Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2019

Debbie Affianty, *Pendidikan Di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Homeschooling Di Tiga*



Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2019

Deden Mauli Darajat dan Akhwan Ali, Jejaring Homeschooling dan Regulasi yang Rapuh di Makassar, Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2019

Ida Rosyidah dan Fikriyati Ihsani, Membangun Toleransi dan Nasionalisme, Menangkal Radikalisme melalui Homeschooling di Kota Bandung, Jakarta, PPIM UIN Jakarta, 2019

## PROFIL PENULIS

**Debbie Affianty** lahir di Jakarta, pada 26 Januari 1974, adalah dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Ia pernah mendapat Fulbright Dikti Awardee for PhD at Northern Illinois University (2009-2010) dan menyelesaikan S2 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia (2003-2005), Graduate Diploma in Arts (Counter Terrorism Studies), Monash University (2006 – 2007), dan Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung (1992-1998). Secara non formal ia pernah mengenyam pendidikan pada Short Course on Leadership Development for Islamic Women Leaders, Deakin University, Melbourne, Australia, 16 September – 1 October 2017, English Language and Orientation Program, Boston University, USA, 2 – 13 August 2010, Introductory to English for Academic Program at Monash University Language Center (2006), English for Academic Purposes at IALF (2005), dan Advanced Academic Writing at AMINEF (American-Indonesian Exchange Foundation) (2001). Penelitian yang pernah ia lakukan, di antaranya adalah Transnational Jihadist Network in Southeast Asia and its Impact to Indonesia, 2019, Religious Education and PVE in Myanmar, 2018, Indonesian Responses to the Claim made by the People’s Republic of China on Natuna Islands, 2018, The Indonesian Government Effort in Tackling Cross Border Terrorism at the Sulu Sea in the Post Marawi Siege, 2018, dan The Maute Group and Regional Security Challenges in Southeast Asia: A Decentralized Model of Terrorist Organization, 2017. Mantan wartawan The Jakarta Post ini dapat dihubungi di [debbielubis@gmail.com](mailto:debbielubis@gmail.com).

**Abdallah** adalah peneliti Pusat Pegkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bergabung di PPIM sejak 2015 hingga sekarang. Fokus kajiannya pada sosial-keagamaan. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Jakarta, prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di PPIM, Abdallah terlibat dalam beberapa penelitian: Regulasi Negara dan Peraturan Daerah Bernuansa Agama (2015); Barriers to University Research in Indonesia (2015) Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar PAI (2016); Guru Agama, Toleransi, dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia (2016); dan sejumlah penelitian terkait isu Counter Violent Extremism (2017). Riset Pendidikan Agama tentang KIKD PAI di sekolah (2019). Abdallah juga pernah bergabung dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Laboratorium Psikologi Politik UI untuk mewancarai narapidana terorisme di sejumlah Lembaga Pemasarakatan. Sejak 2017, ia banyak terlibat dalam pelbagai riset tentang pendidikan agama dan kehidupan keagamaan dalam program Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia yang digawangi oleh PPIM UIN Jakarta bekerja sama dengan UNDP Indonesia. Ia juga kerap menuangkan gagasannya di jurnal *Studia Islamika*, buku, dan di berbagai kolom media massa seperti Tempo, Media Indonesia, Warta Kota, Radar Banten dan sejumlah media online. Ia bisa dijumpai di [abdallah.sy@uinjkt.ac.id](mailto:abdallah.sy@uinjkt.ac.id), laman Facebook: Abdallah Sy, dan Twitter: @abdalla\_sy.

Arief Subhan lahir pada 10 Januari 1966, adalah Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah menjabat sebagai Dekan FIDKOM UIN Jakarta pada tahun 2009-2019. Ia menyelesaikan Studi S3 pada Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, S2 pada Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dan S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Ia dapat dihubungi di email: [arief.subhan@uinjkt.ac.id](mailto:arief.subhan@uinjkt.ac.id).

## **PROFIL LEMBAGA**

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah lembaga riset yang didirikan pada tahun 1994. PPIM telah melakukan riset, advokasi kebijakan dan publikasi yang terkait dengan isu-isu kehidupan beragama dan pendidikan agama di Indonesia. Bekerjasama dengan UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta telah menjalankan program terkait dengan Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) di Indonesia sejak tahun 2017. Program tersebut bertujuan mempromosikan perdamaian di Indonesia berdasarkan pada potensi pendidikan agama dalam mengatasi intoleransi, anti keberagaman, radikalisme dan ekstremisme kekerasan di kalangan anak-anak muda. Selain itu, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal Internasional *Studia Islamika* yang berfokus pada kajian tentang Studi Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.







Collaborative Program:



Empowered lives.  
Resilient nations.

Gedung PPIM UIN Jakarta  
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) |  
Website: <https://conveyindonesia.com>

